



**ANALISIS DETERMINAN KEMISKINAN DI PROVINSI  
JAWA TIMUR TAHUN 2000-2015**

**SKRIPSI**

HALAMAN JUDUL

Oleh

**Desy Anggreini**

**NIM 130810101162**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
JURUSAN ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2017**



**ANALISIS DETERMINAN KEMISKINAN DI PROVINSI  
JAWA TIMUR TAHUN 2000-2015**

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1) dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

HALAMAN JUDUL

Oleh

**Desy Anggreini**

**NIM 130810101162**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
JURUSAN ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2017**

## PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan puji syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya tercinta, yaitu Ayahanda H. Sugeng Marsudi dan Ibunda Niswati, terima kasih atas keikhlasan doa, semangat, pengorbanan, dan dorongan baik secara spiritual maupun materiil serta kasih sayang yang diberikan sehingga ananda bisa menyelesaikan skripsi ini;
2. Ketiga adik saya tersayang Firhan Yahya Marselas, Rindang Dinda Agesti dan Acila Shiyam Fardha yang selalu memberikan dukungan, perhatian, motivasi, dan semangat untuk keberhasilan studi saya selama ini;
3. Yang saya hormati guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan membimbing dengan penuh kesabaran serta keikhlasan;
4. Almamater yang saya banggakan Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember sebagai tempat menimba ilmu.

**MOTTO**

Dari Abu Hurairah radhiallahu'anhu, Sesungguhnya Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda : “Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga.”

(H.R Muslim)

Pendidikan mempunyai akar yang pahit, tapi buahnya manis.

(Aristoteles)

Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat.

(Winston Churchill)

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desy Anggreini

Nim : 130810101162

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2000-2015” adalah benar – benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 4 Desember 2017

Yang menyatakan

Desy Anggreini  
NIM 130810101162

**SKRIPSI**

**ANALISIS DETERMINAN KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TIMUR  
TAHUN 2000-2015**

Oleh

Desy Anggreini  
NIM 130810101162

Pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Duwi Yunitasari, S.E, M.E.

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Siswoyo Hari Santosa, S.E, M.Si.

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Analisis Determinan Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur  
Tahun 2000-2015  
Nama : Desy Anggreini  
Nim : 130810101162  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan  
Konsentrasi : Ekonomi Regional  
Tanggal Persetujuan : 23 November 2017

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Duwi Yunitasari, S.E, M.E  
NIP.19780616 200312 2 001

Dr. Siswoyo Hari Santosa, S.E, M.Si  
NIP. 19680715 199303 1 001

Mengetahui  
Ketua Jurusan

Dr. Sebastiana Viphindartin M.Kes  
NIP. 19641108 1989022 001

**PENGESAHAN**

**Judul Skripsi**

**ANALISIS DETERMINAN KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TIMUR  
TAHUN 2000-2015**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Desy Anggreini

Nim : 130810101162

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

**15 Desember 2017**

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

**Susunan Panitia Penguji**

1. Ketua : Drs. Agus Luthfi, M.Si (.....)  
NIP. 19650522 199002 1 001
2. Sekretaris : Dr. Lilis Yulianti S.E, M.Si (.....)  
NIP. 19690718 199512 2 001
3. Anggota : Aisyah Jumiati S.E, M.P (.....)  
NIP. 19680926 199403 2 002

FOTO WARNA 4 X 6

Mengetahui/Menyetujui  
Universitas Jember  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Dekan,

Dr. Muhammad Miqdad, S.E, M.M, Ak, CA  
NIP. 19710727 199512 1 001



*Analisis Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2000-2015*

**Desy Anggreini**

*Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas Jember*

## **ABSTRAK**

Pembangunan khususnya bidang ekonomi ditempatkan dalam urutan pertama dari seluruh aktivitas pembangunan. Dalam rangka pembangunan ekonomi sekaligus terkait usaha-usaha pemerataan kembali hasil-hasil pembangunan yang merata keseluruh daerah, maupun berupa peningkatan pendapatan masyarakat. Secara bertahap diusahakan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, kemiskinan dan keterbelakangan (Sirojuzilam, 2008). Kemiskinan merupakan salah satu masalah pembangunan dan sosial masyarakat yang terjadi hampir di seluruh belahan dunia, tak terkecuali di Indonesia. Kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensional, hal ini dikarenakan penyebab kemiskinan tidak hanya berasal dari aspek ekonomi saja, melainkan juga disebabkan aspek non ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penentu yang menyebabkan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan pendekatan *fixed effect model* (FEM). Berdasarkan dari hasil analisis, dapat diketahui bahwa variabel laju pdrb (PDRB) tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa timur, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur, Angka Melek Huruf (AMH) dan Upah Minimum (UMK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

**Kata Kunci :** Tingkat Kemiskinan (TK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Laju PDRB (PDRB), Angka Melek Huruf (AMH), Upah Minimum (UMK).

*Poverty Determinant Analysis in East Java Province 2000 – 2015*

**Desy Anggreini**

*Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas Jember*

**ABSTRACT**

*Development in particular the economic field is placed in the first sequence of all development activities. In the framework of economic development as well as related to efforts of equitable distribution of development outcomes throughout the region, as well as in the form of increased incomes of society. It is gradually attempted to reduce economic imbalances, poverty and underdevelopment (Sirojuzilam, 2008). Poverty is one of the development and social problems of society that occur in almost all parts of the world, not least in Indonesia. Poverty is a multidimensional problem, this is because the cause of poverty not only comes from the economic aspects, but also due to non-economic aspects. This study aims to determine the determinants that cause poverty in East Java Province. The method of analysis used in this research is panel data regression with fixed effect model (FEM) approach. Based on the results of the analysis, it can be seen that the variable rate pdrb (PDRB) does not affect poverty rate in East Java Province, Open Unemployment Rate (TPT) has a positive and significant effect on poverty rate in East Java Province, Literacy Rate (AMH) and Minimum Wage (UMK) have a negative and significant effect on poverty level variable in East Java Province.*

**Keywords :** *Level of Poverty (TK), Open Unemployment Rate (TPT), GDP Rate (PDRB), Literacy Rate (AMH), Minimum Wage (UMK).*

## RINGKASAN

**Analisis Determinan Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2000-2015;**  
Desy Anggreini; 130810101162; 2017; 83 halaman; Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Jember.

Pembangunan khususnya bidang ekonomi ditempatkan dalam urutan pertama dari seluruh aktivitas pembangunan. Dalam rangka pembangunan ekonomi sekaligus terkait usaha-usaha pemerataan kembali hasil-hasil pembangunan yang merata keseluruh daerah, maupun berupa peningkatan pendapatan masyarakat. Secara bertahap diusahakan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, kemiskinan dan keterbelakangan (Sirojuzilam, 2008). Peningkatan pertumbuhan yang dilihat dari peningkatan PDRB diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (Sukirno dalam Iqbal, 2015). Kemiskinan merupakan salah satu masalah pembangunan dan sosial masyarakat yang terjadi hampir di seluruh belahan dunia, tak terkecuali di Indonesia dan masih menjadi salah satu masalah pokok yang belum dapat diatasi. Seringkali masalah kemiskinan timbul seiring dengan masalah pengangguran.

Teori pertumbuhan baru menekankan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*). Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dapat diperlihatkan oleh meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Peningkatan pengetahuan dan keahlian akan mampu mendorong peningkatan produktivitas kerja seseorang sehingga akan mampu membantu dalam mengurangi angka kemiskinan (Suliswanto, 2010). Indikator baik atau tidaknya kualitas sumber daya manusia yaitu salah satunya melalui Angka Melek Huruf. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang ditunjukkan dengan laju PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), seringkali sebagai ukuran kesuksesan suatu daerah dalam mencapai cita-cita untuk menciptakan pembangunan ekonomi. Kebijakan upah minimum juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Jika kebutuhan hidup minimum dapat terpenuhi, maka

kesejahteraan pekerja meningkat dan terbebas dari masalah kemiskinan (Kristanto, 2014).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel pengangguran (TPT), laju PDRB, Angka Melek Huruf (AMH), dan upah minimum terhadap tingkat kemiskinan secara parsial dan bersama-sama. Penelitian ini menggunakan data panel pengangguran, laju PDRB, AMH dan upah minimum dari 37 kabupaten/kota di Jawa Timur selama periode 2000 hingga 2015. Alat analisis yang digunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS) untuk mengetahui pengaruh pengangguran, laju PDRB, Angka Melek Huruf, dan upah minimum terhadap tingkat kemiskinan.

Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode OLS diketahui bahwa semua variabel independen berpengaruh secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan dengan probabilitas 0,0000. Sementara hasil dari uji secara parsial, variabel pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan dengan probabilitas sebesar 0,0000. Angka Melek Huruf dan upah minimum berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan dengan probabilitas masing-masing sebesar 0,0016 dan 0,0000 sementara laju PDRB tidak berpengaruh dengan nilai probabilitas 0,3529.

## PRAKATA

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya serta curahan nikmat berupa kekuatan jasmani dan rohani sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2000-2015”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Duwi Yunitasari, S.E, M.E., selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik, dan pengarahan dengan penuh kesabaran dalam penyelesaian skripsi ini;
2. Bapak Dr. Siswoyo Hari Santosa, S.E, M.E., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, SE, MM, Ak, CA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
4. Ibu Dr. Sebastiana Viphindrartin, M.Kes., selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta Staff Karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Staff Edukatif dan Administratif Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Perpustakaan POMA Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Perpustakaan Pusat Universitas Jember yang telah memberikan fasilitas dalam kelancaran penyusunan skripsi ini;

7. Ayahanda H. Sugeng Marsudi dan Ibunda Niswati yang telah memberikan kasih sayang, cinta, doa, dan dukungan baik berupa moral, spiritual, dan materiil serta nasihat yang tiada tara kepada penulis;
8. Adik-adikku Firhan Yahya Marselas, Rindang Dinda Agesti dan Acila Shiyam Fardha yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama ini;
9. Sahabat-sahabatku Dian, Mela, Kasur, Nisa, Sandra, Afi, Soffil, Winda dan Pur yang telah memberikan semangat, perhatian serta dukungan kepada penulis;
10. Seluruh teman-teman jurusan IESP angkatan 2013 khususnya Eka, Kenit, Ulan, Bram, Tyas yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis;
11. Teman-teman KKN 60 Bela, Billy, Nanda, Mamik, Nila, Agung, Ririn, Nadia, Wahyu yang selalu memberi semangat;
12. Teman-teman Kos Puri Asri Farah, Khoir, Lina, Magda, dan lain-lain yang selalu memberi motivasi dan semangat;
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kata sempurna, sehingga penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga bantuan dari berbagai pihak mendapat balasan dari Allah SWT dan harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Jember, Desember 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PEMBIMBING .....	vi
HALAMAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN PENGESAHAN.....	viii
ABSTRAK .....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
RINGKASAN .....	xi
PRAKATA .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR TABEL .....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 LANDASAN TEORI .....	8
2.1.1 Kemiskinan.....	8
2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi.....	10
2.1.3 Pengangguran .....	13
2.1.4 Angka Melek Huruf .....	15
2.1.5 Upah Minimum .....	16

2.2 Penelitian Terdahulu .....	18
2.3 Kerangka Konseptual.....	20
2.4 Hipotesis Penelitian .....	21
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>22</b>
3.1 Rancangan Penelitian.....	22
3.1.1 Jenis Penelitian.....	22
3.1.2 Unit Analisis.....	22
3.1.3 Jenis dan Sumber Data .....	22
3.2 Metode Analisis Data.....	22
3.2.1 Fixed Effect Model (FEM).....	25
3.2.2 Random Effect Model (REM).....	25
3.3 Pemilihan Model dalam Pengolahan Data .....	26
3.3.1 Hausman Test .....	26
3.4 Uji Statistik.....	27
3.4.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t).....	27
3.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	28
3.4.3 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	29
3.5 Uji Asumsi Klasik .....	29
3.5.1 Uji Multikolinearitas .....	29
3.5.2 Uji Heteroskedastisitas .....	30
3.5.3 Uji Autokorelasi .....	30
3.5.4 Uji Normalitas .....	32
3.6 Definisi Operasional Variabel .....	32
<b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
4.1 Gambaran Umum.....	34
4.1.1 Keadaan Geografis Wilayah Jawa Timur.....	34
4.1.2 Kondisi Demografis Jawa Timur .....	35
4.2 Gambaran Variabel Penelitian.....	36
4.2.1 Kondisi Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Timur .....	36
4.2.2 Kondisi Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur.....	36
4.2.3 Kondisi Pengangguran Provinsi Jawa Timur .....	36



4.2.4 Kondisi Angka Melek Huruf Provinsi Jawa Timur .....	40
4.2.5 Kondisi Upah Minimum Provinsi Jawa Timur .....	41
<b>4.3 Hasil Analisis Data.....</b>	<b>42</b>
4.3.1 Pengujian Model Data Panel .....	42
4.3.2 Analisis Regresi Data Panel .....	43
4.3.3 Uji Statistik.....	46
4.3.4 Uji Asumsi Klasik .....	47
<b>4.4 Pembahasan Hasil Penelitian .....</b>	<b>51</b>
4.4.1 Pengaruh Laju PDRB terhadap Tingkat Kemiskinan .....	52
4.4.1 Pengaruh Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan .....	53
4.4.3 Pengaruh Angka Melek Huruf terhadap Tingkat Kemiskinan .....	54
4.4.4 Pengaruh upah minimum (UMK) terhadap tingkat kemiskinan .....	55
<b>BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>57</b>
5.1 Kesimpulan.....	57
5.2 Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>62</b>

**DAFTAR TABEL**

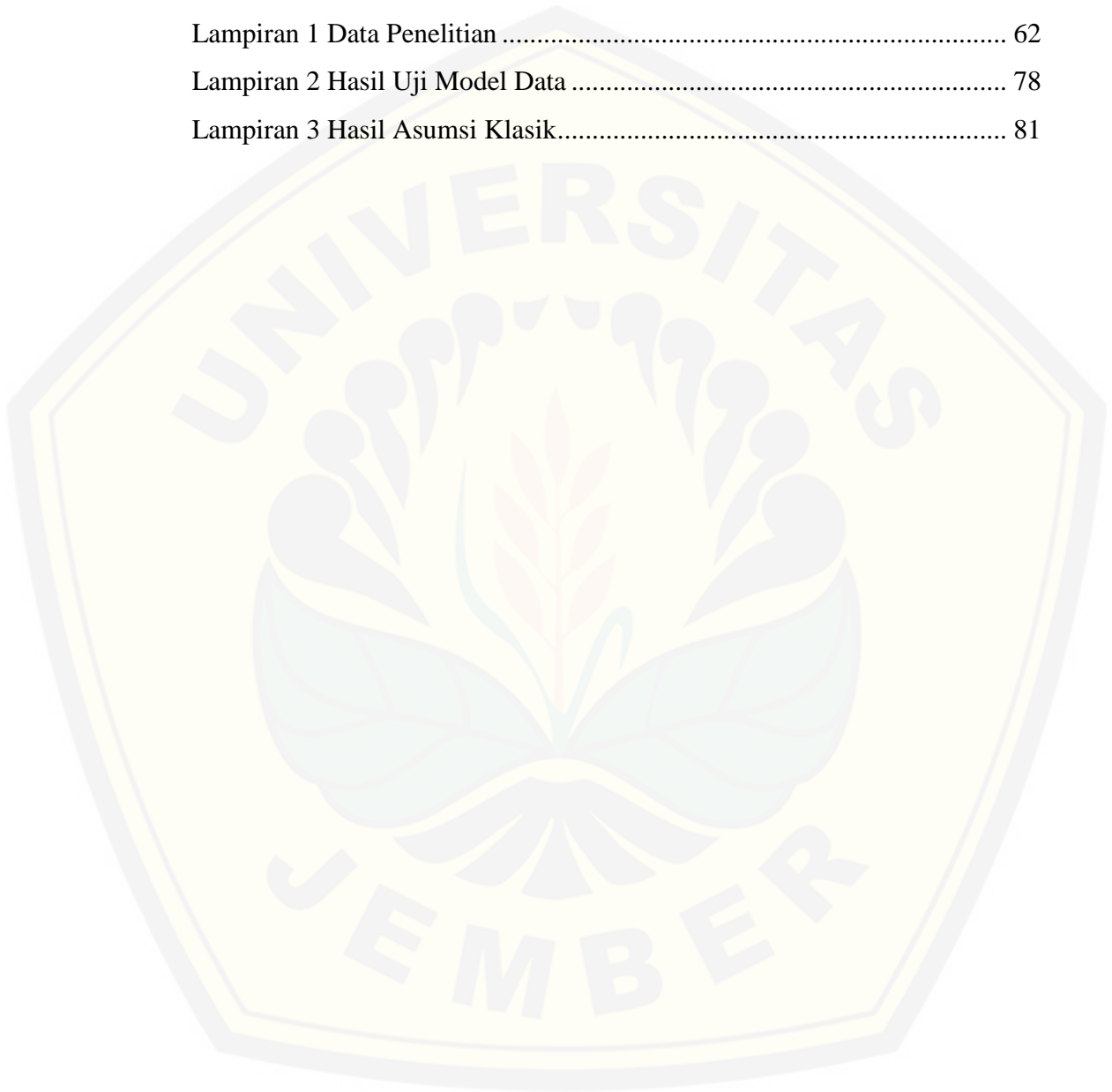
Tabel 1.1 .....	2
Tabel 2.1 .....	19
Tabel 3.1 .....	31
Tabel 4.1 .....	36
Tabel 4.2 .....	41
Tabel 4.3 .....	42
Tabel 4.4 .....	43
Tabel 4.5 .....	44
Tabel 4.6 .....	46
Tabel 4.7 .....	49
Tabel 4.8 .....	49
Tabel 4.9 .....	58

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 .....	1
Gambar 1.2 .....	3
Gambar 1.3 .....	4
Gambar.1.4 .....	5
Gambar 2.1 .....	9
Gambar 2.2 .....	13
Gambar 2.3 .....	20
Gambar.3.1 .....	31
Gambar 4.1 .....	34
Gambar 4.2 .....	37
Gambar 4.3 .....	39
Gambar.4.4 .....	40
Gambar 4.5 .....	40
Gambar 4.6 .....	48

**DAFTAR LAMPIRAN**

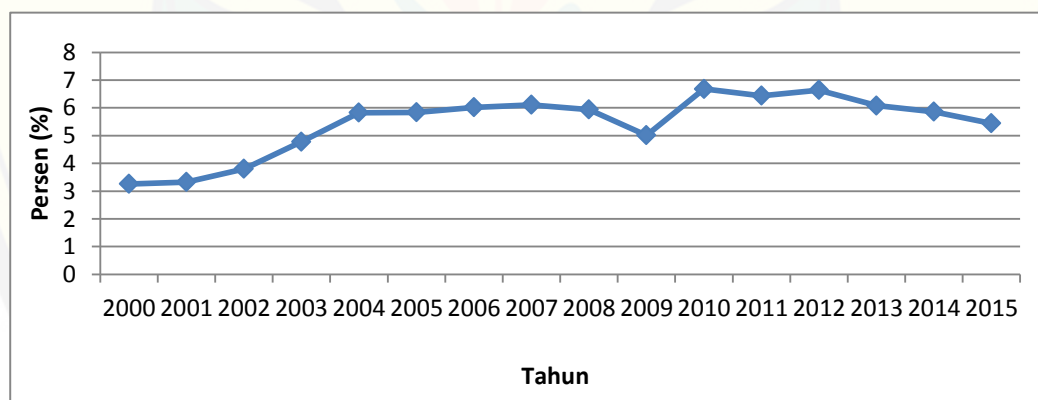
Lampiran 1 Data Penelitian .....	62
Lampiran 2 Hasil Uji Model Data .....	78
Lampiran 3 Hasil Asumsi Klasik.....	81



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan khususnya bidang ekonomi ditempatkan dalam urutan pertama dari seluruh aktivitas pembangunan. Dalam rangka pembangunan ekonomi sekaligus terkait usaha-usaha pemerataan kembali hasil-hasil pembangunan yang merata ke seluruh daerah, maupun berupa peningkatan pendapatan masyarakat. Secara bertahap diusahakan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, kemiskinan dan keterbelakangan (Sirojuzilam, 2008). Pembangunan ekonomi diartikan sebagai serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan semakin berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat. Sebagai implikasi dari perkembangan ini diharapkan kesempatan kerja akan bertambah, tingkat pendidikan meningkat, dan kemakmuran masyarakat menjadi semakin tinggi (Sukirno, 2006).



Gambar 1.1 Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur tahun 2002-2015 (Sumber : BPS Jatim, 2016)

Gambar 1.1 menunjukkan grafik laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur yang dapat dilihat dari laju PDRB setiap tahunnya. Laju PDRB dari tahun 2000 hingga tahun 2007 terjadi kenaikan dari awalnya sebesar 3,26% pada tahun 2000 menjadi 6,11% pada tahun 2007. Akan tetapi dari tahun 2008 ke 2009 terjadi penurunan yang cukup tajam dari 5,94% menjadi 5,01%. Pada tahun 2010

ke 2012 laju PDRB cenderung mengalami grafik yang fluktuatif dan dari 2012 ke 2015 laju PDRB cenderung menurun.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah pembangunan dan sosial masyarakat yang terjadi hampir di seluruh belahan dunia, tak terkecuali di Indonesia. Kemiskinan masih menjadi salah satu masalah pokok yang belum dapat diatasi. Program pemerintah bahkan belum dapat mengatasi masalah kemiskinan dengan tuntas. Seringkali masalah kemiskinan timbul seiring dengan masalah pengangguran. Arsyad (1997) menyatakan bahwa ada hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Bagi sebagian besar masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan, berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin.

Teori pertumbuhan baru menekankan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*). Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dapat diperlihatkan oleh meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Peningkatan pengetahuan dan keahlian akan mampu mendorong peningkatan produktivitas kerja seseorang sehingga akan mampu membantu dalam mengurangi angka kemiskinan (Suliswanto, 2010). Indikator baik atau tidaknya kualitas sumber daya manusia yaitu salah satunya melalui Angka Melek Huruf. Penanggulangan kemiskinan menjadi penting karena jika tidak diatasi segera kemiskinan akan berdampak pada level yang lebih jauh seperti kualitas kehidupan manusia dan kesehatan.

Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar. Bahkan jumlah penduduk di Indonesia termasuk dalam 5 besar jumlah penduduk di dunia. Berikut Tabel 1.1 tentang 5 negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia.

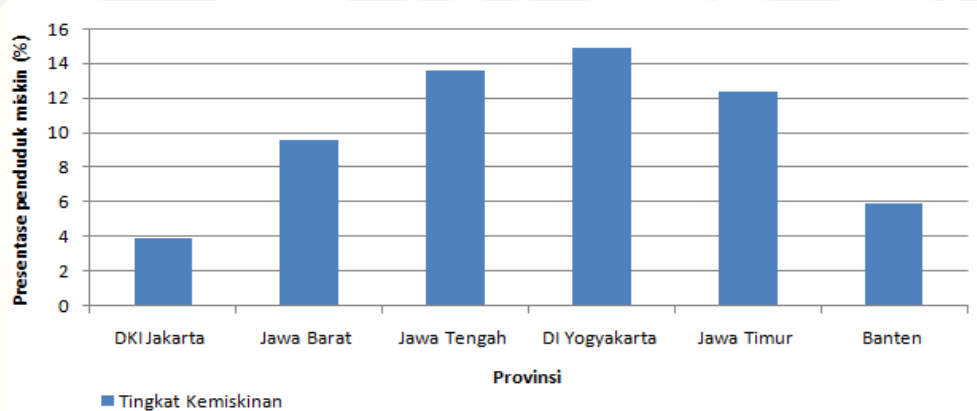
Tabel 1.1 Peringkat negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia

Peringkat	Negara	Jumlah penduduk (orang)
1	Tiongkok	1.371.220.000
2	India	1.311.051.000
3	Amerika Serikat	321.419.000
4	Indonesia	257.564.000
5	Brasil	207.848.000

Sumber : World Bank, 2017

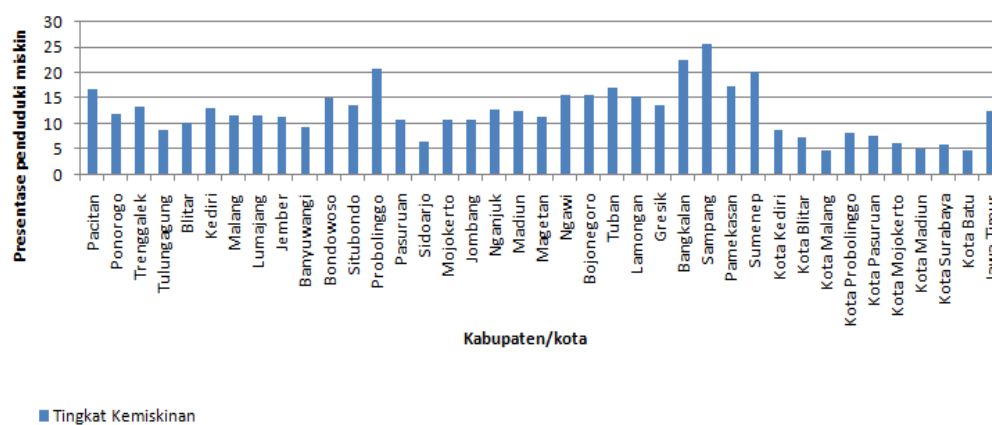
Tabel 1.1 menjelaskan bahwa jumlah penduduk Indonesia sebesar 257.564.000 dan merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat setelah Negara Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Dengan jumlah penduduk yang besar tersebut Indonesia dapat memanfaatkannya dengan memberikan keterampilan dan pendidikan agar dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan yang ada di Indonesia.

Kemiskinan hampir terjadi di seluruh provinsi di Indonesia, tak terkecuali di Provinsi Jawa Timur. Tingkatkemiskinan di Provinsi Jawa Timur cukup tinggi diantara provinsi lainnya di Pulau Jawa. Pada Gambar 1.2 akan disajikan diagram tingkat kemiskinan di Pulau Jawa.



Gambar 1.2 Tingkat kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2015 (Sumber : BPS Jatim, 2016)

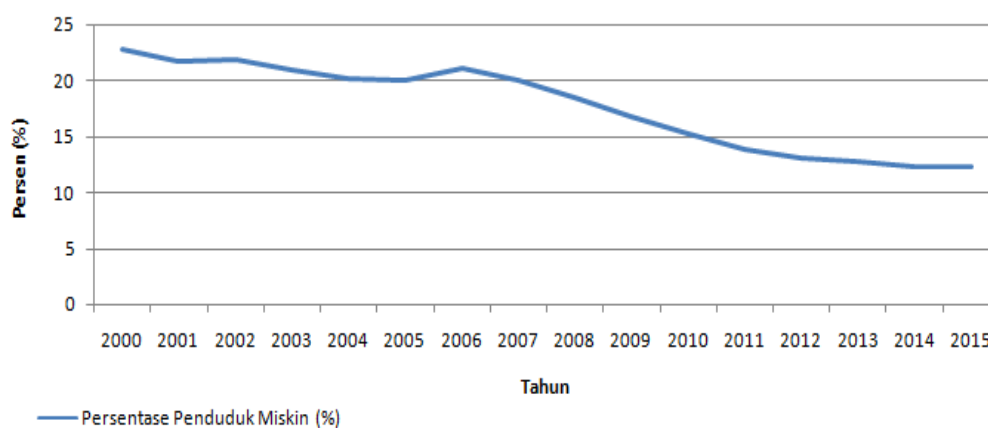
Gambar 1.2 menjelaskan bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki tingkat kemiskinantertinggiketiga se-Jawa dengan tingkat kemiskinansebesar 12,34%, setelah Provinsi DIY dan Provinsi Jawa Tengah dengan nilai masing-masing sebesar 14,91% dan 13,58%. Sementara provinsi dengan tingkat kemiskinan terkecil se-Jawa yaitu Provinsi DKI Jakarta dengan nilai 3,93%.



Gambar 1.3 Presentase penduduk miskin menurut kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2015 (Sumber : BPS Jatim, 2016)

Gambar 1.3 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan menurut kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tertinggi adalah Kabupaten Sampang dengan presentase penduduk miskin sebesar 25,69%, di urutan kedua yaitu Kabupaten Bangkalan dengan presentase sebesar 22,57%, dan di urutan ketiga Kabupaten Probolinggo dengan presentase penduduk miskin sebesar 20,82%. Angka tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan di Provinsi Jawa Timur masih tinggi bahkan ketiga kabupaten tersebut tingkat kemiskinannya lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur yang sebesar 12,34%. Sementara tingkat kemiskinan di Jawa Timur tidak selalu mengalami penurunan. Dapat dilihat pada gambar di bawah, tingkat kemiskinan mengalami kenaikan dari tahun 2014-2015.





Gambar 1.4 Grafik tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur tahun 2000-2015 (Sumber : BPS Jatim, 2016).

Gambar 1.4 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2000-2015 mengalami grafik yang fluktuatif. Pada tahun 2000 tingkat kemiskinan sebesar 21,09% dan menjadi 12,28% di tahun 2014. Akan tetapi pada tahun 2014 ke 2015 terjadi kenaikan sebesar 0,06% yaitu dari 12,28% menjadi 12,34%. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi kemungkinan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur masih dapat terus meningkat seiring bertambahnya tahun.

Kebijakan upah minimum juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Kebijakan penetapan upah minimum oleh pemerintah adalah kebijakan yang diterapkan dengan tujuan sebagai jaring pengaman terhadap pekerja atau buruh agar tidak dieksploitasi dalam bekerja dan mendapat upah yang dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum (KHM). Jika kebutuhan hidup minimum dapat terpenuhi, maka kesejahteraan pekerja meningkat dan terbebas dari masalah kemiskinan (Kristanto, 2014).

Untuk menurunkan tingkat kemiskinan terlebih dahulu perlu diketahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat kemiskinan, sehingga dapat dirumuskan kebijakan yang efektif untuk menurunkan angka kemiskinan di Jawa Timur. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi tingkat kemiskinan di Jawa Timur antara lain (1) laju PDRB; (2) Pengangguran; (3) Angka Melek Huruf; (4) Upah Minimum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan latar

belakang diatas, maka saya ingin meneliti tentang Analisis Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2000-2015.

### **1.2 Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terbuka, laju pdrb, melek huruf, dan upah minimum secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur tahun 2000-2015?
- b. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terbuka, laju pdrb, angka melek huruf dan upah minimum secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur tahun 2000-2015?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terbuka, laju pdrb, angka melek huruf dan upah minimum secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur tahun 2000-2015.
- b. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terbuka, laju pdrb, angka melek huruf dan upah minimum berpengaruh secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur tahun 2000-2015.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hal-hal yang diperoleh dari penelitian tentang Analisis Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2000-2015 diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dengan permasalahan yang penulis teliti. Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini diantaranya adalah :

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman tentang determinan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
- b. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dan masukan dalam membuat kebijakan yang tepat dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pengetahuan mengenai permasalahan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
- d. Bagi pihak lain, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan dan sumber informasi tambahan dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya dengan mengangkat tema yang sama, atau hanya sebagai bahan bacaan untuk memperluas wawasan pembaca.



## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 LANDASAN TEORI

#### 2.1.1 Kemiskinan

##### 1. Definisi Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimum untuk hidup layak. Pengertian lainnya kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara dengan 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non-makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya.

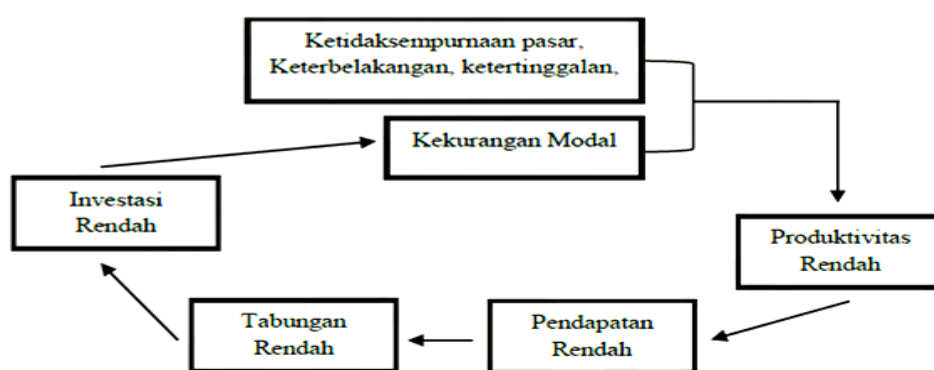
Menurut Djojohadikusumo (1995) dalam Iqbal (2015), pola kemiskinan ada empat yaitu, Pertama adalah *persistent poverty*, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun-temurun. Pola kedua adalah *cyclical poverty*, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. Pola ketiga adalah *seasonal poverty*, yaitu kemiskinan musiman seperti dijumpai pada kasus nelayan dan petani tanaman pangan. Pola keempat adalah *accidental poverty*, yaitu kemiskinan karena terjadinya bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.

Menurut Todaro dan Smith (2006) dalam Kumalasari (2011), tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di suatu negara tergantung pada dua faktor utama, yakni: tingkat pendapatan nasional rata-rata, dan lebar sempitnya kesenjangan distribusi pendapatan. Setinggi apapun tingkat pendapatan nasional perkapita yang dicapai oleh suatu negara, selama distribusi pendapatannya tidak merata, maka tingkat kemiskinan di negara tersebut pasti akan tetap parah. Demikian pula sebaliknya, semerata apapun distribusi pendapatan di suatu negara, jika tingkat

pendapatan nasional rata-ratanya rendah, maka kemiskinan juga akan semakin luas.

## 2. Teori Penyebab Kemiskinan

Penyebab kemiskinan bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*viciouscircle of poverty*) menurut Nurkse (dalam Kuncoro, 2006). Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar di 2.1.



Gambar 2.1 Teori Lingkaran Setan Kemiskinan (*Vicious Circle Of Poverty*) oleh Nurkse (Sumber : Nurkse (1953) dalam Mudrajad Kuncoro, 2006)

Adanya ketidaksempurnaan pasar, keterbelakangan, ketertinggalan, kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi, rendahnya investasi akan berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya. Dalam mengemukakan teorinya tentang lingkaran setan kemiskinan, pada hakikatnya Nurkse berpendapat bahwa kemiskinan bukan saja disebabkan oleh ketiadaan pembangunan masa lalu tetapi juga disebabkan oleh hambatan pembangunan di masa yang akan datang. Sehubungan dengan hal ini Nurkse mengatakan : Suatu negara menjadi miskin karena ia merupakan negara miskin” (*A country is poor because it is poor*), karena memiliki produktivitas yang rendah. Rendahnya produktivitas akan menghasilkan penghasilan masyarakat yang rendah pula, sehingga hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya yang minim. Karena itulah mereka tidak bisa menabung, padahal tabungan merupakan sumber utama pembentukan modal masyarakat. Rendahnya tabungan maka investasi

mengalami penurunan sehingga melingkarulang menuju keadaan kurangnya modal. Demikian seterusnya, berputar (Puspita, 2015).

### 3. Ukuran Kemiskinan

BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin (PM). Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan. Persentase penduduk miskin di suatu provinsi dihitung dengan (Kumalasari, 2011) :

$$\%PM_p = \frac{PM_p}{P_p}$$

Dimana:

% PM<sub>p</sub> : Persentase penduduk miskin di provinsi p

PM<sub>p</sub> : Jumlah penduduk miskin di provinsi p

P<sub>p</sub> : Jumlah penduduk di provinsi p

Sedangkan Bank Dunia mengukur garis kemiskinan berdasarkan pada pendapatan seseorang. Seseorang yang memiliki pendapatan kurang dari US\$ 1,25 per hari dan US\$ 2 per hari masuk dalam kategori miskin (*world bank*, 2009 dalam Kumalasari, 2011).

#### 2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditunjukkan dengan tingkat pertambahan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), sehingga tingkat perkembangan PDRB perkapita yang dicapai masyarakat seringkali sebagai ukuran kesuksesan suatu daerah dalam mencapai cita-cita untuk menciptakan pembangunan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan yang dilihat dari peningkatan PDRB diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Untuk melakukan peningkatan tersebut, peran pemerintah diperlukan guna

pembentukan strategi dan perencanaan pembangunan daerah (Sukirno dalam Iqbal, 2015). Terdapat teori-teori pembangunan yang membahas tentang pertumbuhan ekonomi antara lain :

#### 1. Teori Pertumbuhan Adam Smith

Adam Smith membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menjadi 5 tahap yang berurutan, yaitu dimulai dari masa perburuan, masa berternak, masa bercocok tanam, perdagangan dan tahap perindustrian. Dalam prosesnya, pertumbuhan ekonomi akan semakin terpacu dengan adanya sistem pembagian kerja antar pelaku ekonomi. Pembagian kerja adalah titik permulaan dari teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith yang meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. Tetapi Adam Smith menekankan bahwa pemupukan modal harus dilakukan lebih dahulu daripada pembagian kerja karena sebagai satu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi (Jhingan, 2012).

Menurut teori ini, akumulasi modal akan menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Proses pertumbuhan akan terjadi secara simultan dan memiliki hubungan keterkaitan satu dengan lainnya. Timbulnya peningkatan kinerja pasar suatu sektor akan meningkatkan daya tarik bagi penanaman modal, mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan spesialisasi dan memperluas pasar. Hal tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi semakin pesat. Namun pertumbuhan ekonomi akan mulai mengalami perlambatan jika daya dukung alam tidak mampu lagi mengimbangi aktivitas ekonomi yang ada (Kuncoro, 2006).

Menurut Adam Smith apabila pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan, maka pemupukan modal berhenti, penduduk menjadi stasioner, keuntungan minimum, upah berada pada tingkat kehidupan minimal, tidak ada perubahan pendapatan per kapita, serta produksi dan perekonomian menjadi macet. Keadaan stasioner ini mengakibatkan kesengsaraan semakin parah atau kemiskinan meningkat (Jhingan, 2012).

#### 2. Teori Pertumbuhan Baru (Pertumbuhan Endogen)

Teori ini mengasumsikan bahwa investasi swasta dan publik (pemerintah) di bidang sumber daya atau modal manusia dapat menciptakan ekonomi eksternal

(eksternal positif) dan memacu peningkatan produktivitas yang mampu mengimbangi kecenderungan alamiah penurunan skala hasil (Todaro, 2004). Dengan kata lain peranan pemerintah dibutuhkan dalam pembangunan modal manusia (*human capital*) untuk meningkatkan produktivitasnya. Dalam teori pertumbuhan baru ini terdapat persamaan sederhana yaitu :

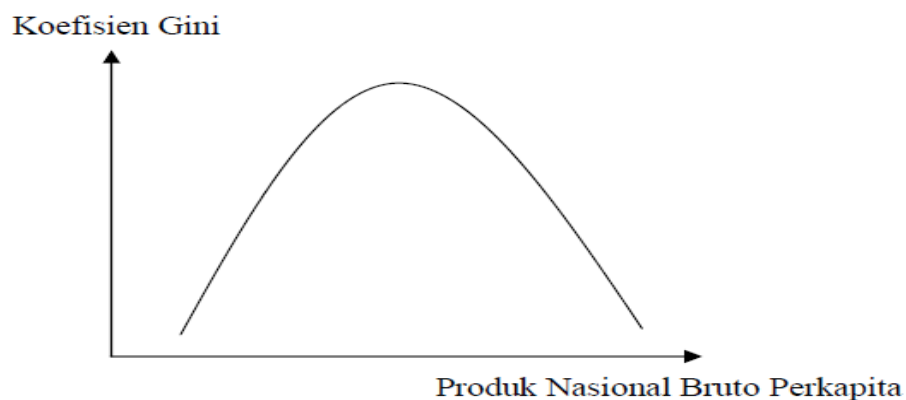
$$Y = AK$$

Dalam rumusan ini A mewakili setiap faktor yang mempengaruhi teknologi, sedangkan K melambangkan modal fisik dan modal manusia yang ada. Dalam rumusan itu ditekankan adanya kemungkinan bahwa investasi dalam modal fisik dan manusia akan dapat menciptakan ekonomi eksternal yang positif dan peningkatan produktivitas (Todaro, 2004). Kenyataannya dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya. Kesejahteraan yang lebih baik dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan yang terjadi di masyarakat (Iqbal, 2015).

### 3. Teori Pertumbuhan Ekonomi Kuznet

Pertumbuhan ekonomi menurut Kuznet (dalam Saputra, 2011) memiliki korelasi yang kuat terhadap kemiskinan, pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk dan menyebabkan tingkat kemiskinan cenderung meningkat, namun pada saat mendekati tahap akhir distribusi pendapatannya akan membaik dan terjadi pengurangan tingkat kemiskinan secara berkesinambungan. Dengan demikian, dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang negatif terhadap kemiskinan. Hal tersebut digambarkan dalam kurva Kuznets pada gambar 2.2.





Gambar 2.2 Kurva Kuznet (Sumber : Todaro, 2004 dalam Saputra, 2011)

### 2.1.3 Pengangguran

Pengangguran adalah seseorang yang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan (Sukirno, 2004). Jenis-jenis pengangguran menurut Sukirno (2004) berdasarkan keadaan yang menyebabkan, yaitu :

a. Pengangguran Normal atau Friksional

Pengangguran friksional merupakan pengangguran yang disebabkan karena seseorang meninggalkan pekerjaannya dan mencari pekerjaan yang lebih baik dan sesuai dengan keinginannya.

b. Pengangguran Siklikal

Adakalanya perekonomian akan mengalami penurunan permintaan agregat secara signifikan. Kemerosotan permintaan agregat ini mengakibatkan perusahaan-perusahaan mengurangi tenaga kerja atau bahkan menutup perusahaannya sehingga akan meningkatkan angka pengangguran.

Jenis-jenis pengangguran berdasarkan cirinya :

a. Pengangguran Terbuka

Pengangguran ini tercipta sebagai akibat dari pertumbuhan kesempatan kerja yang tidak sejalan dengan pertumbuhan tenaga kerja, akibatnya banyak tenaga kerja yang tidak memperoleh pekerjaan. BPS mendefinisikan pengangguran terbuka adalah penduduk yang telah masuk

dalam angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, serta sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

b. Pengangguran Tersembunyi

Keadaan dimana suatu jenis kegiatan ekonomi di jalankan oleh tenaga kerja yang jumlahnya melebihi dari yang diperlukan.

c. Pengangguran Musiman

Pengangguran musiman adalah keadaan yang terjadi pada masa-masa tertentu dalam suatu waktu tertentu. Keadaan ini biasanya terjadi di sektor pertanian karena petani akan menganggur saat menunggu masa tanam dan saat jeda antara musim tanam dan musim panen.

d. Pengangguran Setengah Menganggur

Seseorang yang termasuk angkatan kerja dan mendapat pekerjaan namun bekerja dibawah jam kerja normal. BPS menyebutkan jam kerja normal di Indonesia adalah 35 jam seminggu. Dengan kata lain, pekerja yang bekerja dibawah 35 jam dalam seminggu termasuk dalam golongan setengah menganggur.

Hubungan antara pengangguran dengan tingkat kemiskinan juga didukung oleh teori lingkaran setan kemiskinan Nurkse yang menggambarkan rendahnya produktivitas sebagai salah satu penyebab kemiskinan. Pengangguran bisa diartikan sebagai rendahnya produktivitas seseorang. Hal itu dikarenakan penganggur tidak melakukan pekerjaan apapun untuk menghasilkan upah yang nantinya digunakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semakin banyak pengangguran maka akan menyebabkan tingkat kemiskinan terus bertambah.

#### 2.1.4 Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dll) terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. AMH dapat digunakan untuk:

- a. Mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan di Indonesia dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD.
- b. Menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media.
- c. Menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Sehingga angka melek huruf dapat berdasarkan kabupaten mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah (Data statistik, 2008 dalam Ernawati, 2011).

Cara Menghitung:

Angka melek huruf didapat dengan membagi jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas kemudian hasilnya dikalikan dengan seratus.

Rumus :

$$AMH\ 15+ = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Keterangan :

*AMH* 15 + = angka melek huruf (penduduk usia 15 tahun ke atas)

a = jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis

b = jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas

#### 2.1.5 Upah Minimum

Upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerja. Menurut Kaufman (2000) dalam Kristanto (2014), tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah memenuhi standar hidup minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. Kebijakan upah minimum di Indonesia tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999 dan UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor :

Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Yang di maksud dengan tunjangan tetap adalah suatu jumlah imbalan yang diterima pekerja secara tetap dan teratur pembayarannya, yang dikaitkan dengan kehadiran ataupun pencapaian prestasi tertentu.

Menurut Hasanuddin Rachman (2005) dalam Kristanto (2014), Tujuan penetapan upah minimum dapat dibedakan secara mikro dan makro. Secara mikro tujuan penetapan upah minimum yaitu :

- a. Sebagai jaring pengaman agar upah tidak merosot.
- b. Mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi di perusahaan.
- c. Meningkatkan penghasilan pekerja pada tingkat paling bawah.

Sedangkan secara Makro, penetapan upah minimum bertujuan untuk :

- a. Pemerataan pendapatan
- b. Peningkatan daya beli pekerja dan perluasan kesempatan kerja
- c. Perubahan struktur biaya industri sektoral
- d. Peningkatan produktivitas kerja nasional dan peningkatan etos dan disiplin kerja
- e. Memperlancar komunikasi pekerja dan pengusaha dalam rangka hubungan bipartite.

Upah minimum dapat dibedakan menjadi Upah Minimum Regional dan Upah Minimum Sektoral

- a. Upah Minimum Regional

Upah Minimum Regional adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap bagi seorang pekerja tingkat paling bawah dan bermasa kerja kurang dari satu tahun yang berlaku di suatu daerah tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja : PER-01/MEN/1999 tentang upah minimum, Upah Minimum Regional (UMR) dibedakan menjadi dua yaitu Upah Minimum Regional Tingkat I (UMR tk.I) dan Upah Minimum Regional Tingkat II (UMR tk.II). Namun sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (KEP-226/MEN/2000) tentang perubahan pada pasal 1,3,4,8,11,20 dan 21 PER-01/MEN/1999 tentang upah minimum, maka istilah Upah Minimum

Regional Tingkat I (UMR tk.I) diubah menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Tingkat II (UMR tk.II) diubah menjadi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UM kab/kota) (Kristanto, 2014).

b. Upah Minimum Sektoral

Upah minimum sektoral adalah upah yang berlaku dalam suatu provinsi berdasarkan kemampuan sektor. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja : Per-01/MEN/1999 tentang upah minimum, upah minimum sektoral dibedakan menjadi Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat I (UMSR Tk. I) dan Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat II (UMSR Tk. II). Dalam perkembangan selanjutnya sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (KEP-226/MEN/2000) tentang perubahan pada pasal 1, 3, 4, 8, 11, 20 dan 21 PER-01/MEN/1999 tentang upah minimum, maka terjadi perubahan istilah Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat I (UMSR Tk. I) menjadi Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat II (UMSR Tk. II) diubah menjadi Upah Minimum Sektoral Kabupaten /Kota (UMS kab/kota) (Kristanto, 2014).

Variabel-variabel yang mempengaruhi upah minimum regional (UMR) Tingkat I dan II sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor :Per-01/Men/1999, adalah sebagai berikut : kebutuhan hidup minimum (KHM), indeks harga konsumen (IHK), kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan, tingkat upah pada umumnya yang berlaku di daerah tertentu dan antar daerah, kondisi pasar kerja, dan tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan perkapita. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-17/Men/VIII/2006 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak serta sesuai UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 88 (4) tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa besaran upah minimum antara lain didasarkan pada tahap pencapaian KHL, pertumbuhan PDRB, produktivitas, dan mempertimbangkan keberadaan sektor marjinal (usaha yang paling tidak mampu). Pada pelaksanaannya, pertimbangan pada usaha tidak mampu ternyata belum dapat di operasionalkan (Kristanto, 2014).

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam Penelitian terdahulu berguna sebagai referensi dan juga bahan untuk membantu penulis dalam proses penyusunan penelitian ini. Beberapa penelitian yang sejenis yang berkaitan dengan skripsi tercantum pada Tabel 2.1.

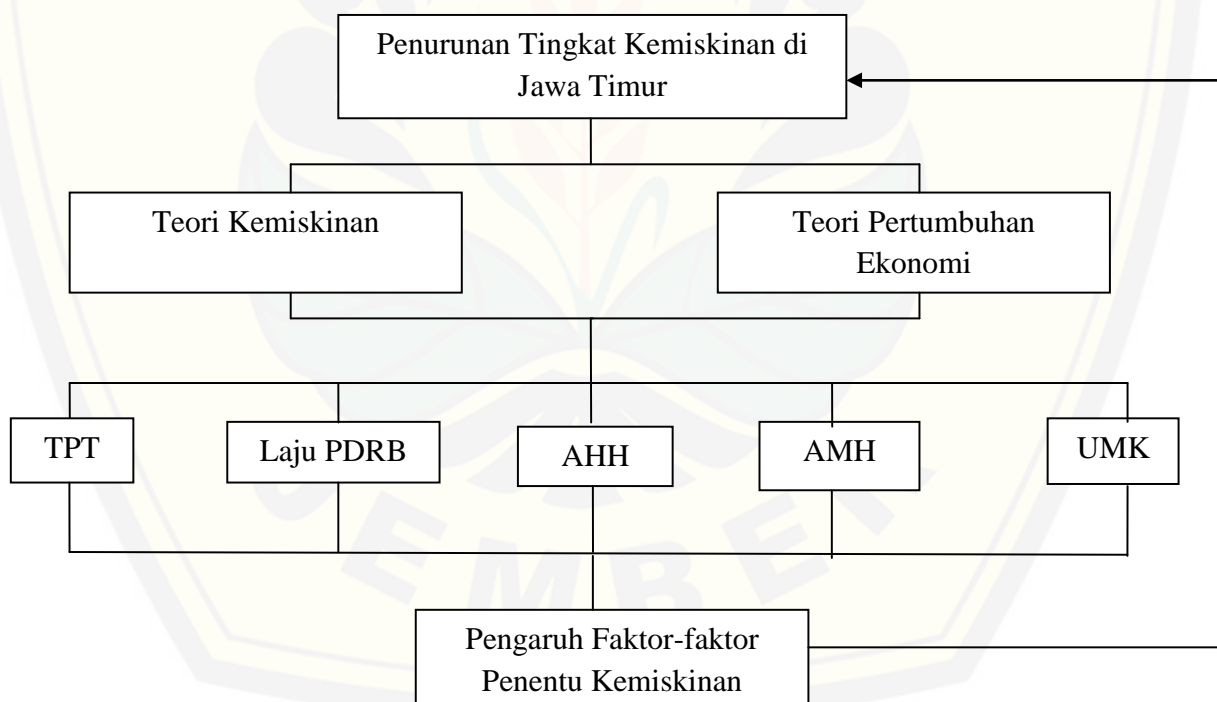
Pada Tabel 2.1 di bawah merupakan ringkasan dari penelitian-penelitian terdahulu yang dapat diketahui perbedaan serta persamaan dengan penelitian sekarang. Perbedaan yang pertama terletak pada variabel independen yang diteliti yaitu peneliti menggunakan variabel laju pdrb, tingkat pengangguran terbuka, angka melek huruf, angka harapan hidup dan upah minimum kabupaten/kota. Kedua yaitu tahun penelitian dari 2000 hingga 2015. Ketiga adalah objek penelitian yang diambil yaitu Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Terakhir yaitu data yang digunakan adalah data panel 37 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama menggunakan alat analisis regresi, dan dengan variabel dependen yang sama yakni variabel tingkat kemiskinan.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Alat analisis	Hasil	
1	Dita Wahyu Puspita, 2015	Analisis Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah	Regresi data panel model <i>Random Effect Generalized Least Square</i> .	Variabel Pengangguran, PDRB dan Populasi berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan, sementara variabel angka melek huruf tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.	
2	Yarlina Yacoub, 2012	Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat	Analisis regresi data panel.	Hasil estimasi pengaruh tingkat pengangguran (X) terhadap tingkat kemiskinan (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat signifikan.	
3	Vighar Choirul Iqbal, 2015	Analisis Performa Makro Kemiskinan Timur	Pengaruh Ekonomi Terhadap di Jawa	Analisis regresi data panel	Variabel laju pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin, sementara IPM berpengaruh negatif.
4	Sasumbar Saleh, 2002	Faktor-faktor Tingkat Kemiskinan Regional di Indonesia	Penentu Kemiskinan	Analisis regresi data panel	Variabel pendapatan perkapita, kesenjangan pendapatan, harapan hidup, rata-rata sekolah, ipm, investasi fisik tingkat partisipasi politik dan ekonomi perempuan, populasi penduduk yang tidak mempunyai akses air bersih dan krisis ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan sementara investasi sdm oleh pemerintah tidak.
5	Astrini & Purbadharmaja, 2013	Pengaruh Pengangguran dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali	PDRB, dan Terhadap	Analisis regresi linear berganda	Variabel PDRB, pengangguran dan pendidikan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan sementara laju pdrb tidak berpengaruh signifikan.
6	Adi Agus Prastyo, 2010	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan (studi kasus 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2003-2007)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan	Analisis regresi data panel	Variabel pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan dan tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

### 2.3 Kerangka Konseptual

Penelitian ini menjelaskan bahwa Jawa Timur merupakan Provinsi di Indonesia dengan presentase penduduk miskin yang cukup tinggi. Menurut teori kemiskinan oleh Nurkse, “Suatu negara menjadi miskin karena ia merupakan negara miskin” (*A country is poor because it is poor*), karena memiliki produktivitas yang rendah”. Menurut Teori Pertumbuhan Ekonomi, Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat kemiskinan. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi tingkat kemiskinan di Jawa Timur yaitu, laju PDRB, tingkat pengangguran terbuka, angka melek huruf dan upah minimum kabupaten/kota. Setelah kita mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan, maka diharapkan akan ada solusi yang tepat bagi penurunan tingkat kemiskinan di Jawa Timur.



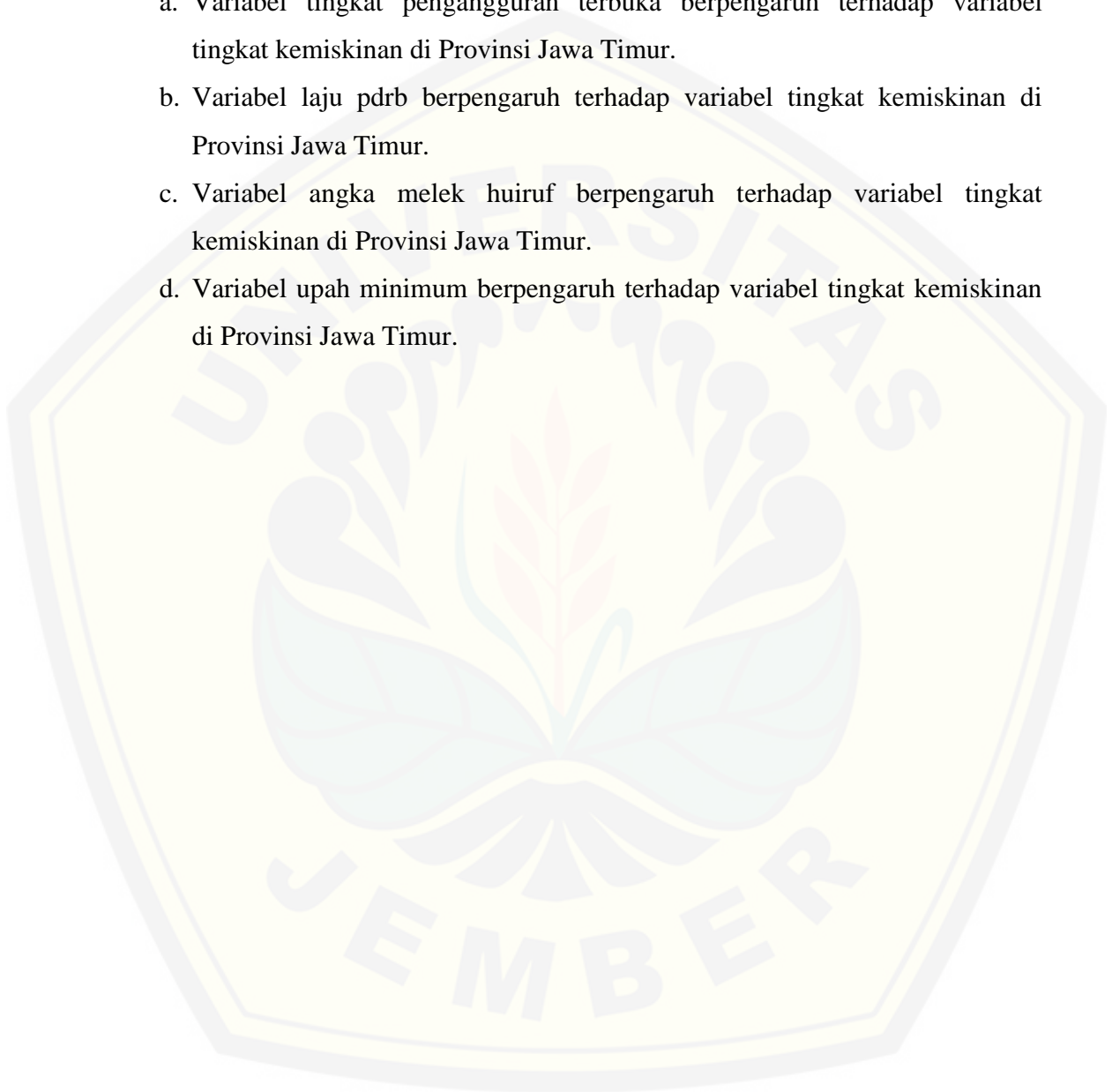
Gambar 2.3 Kerangka konseptual



#### **2.4 Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan teori-teori dan penelitian yang terdahulu, maka hipotesis dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap variabel tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
- b. Variabel laju pdrb berpengaruh terhadap variabel tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
- c. Variabel angka melek huruf berpengaruh terhadap variabel tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
- d. Variabel upah minimum berpengaruh terhadap variabel tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.



## BAB 3. METODE PENELITIAN

### 3.1 Rancangan Penelitian

#### 3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian *eksplanatory*. Penelitian ini bermaksud untuk menguji dan menjelaskan hubungan antar variabel bebas (*exogen variable*) dan variabel terikat (*endogen variable*) (Yacoub, 2012).

#### 3.1.2 Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan variabel tingkat kemiskinan sebagai variabel dependen, sedangkan laju PDRB, tingkat pengangguran terbuka, angka melek huruf dan upah minimum sebagai variabel independen.

#### 3.1.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dari penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dari buku-buku literatur, jurnal atau karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini di dapat dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, yaitu data mengenai : (1) Tingkat Kemiskinan; (2) laju PDRB; (3) Tingkat Pengangguran Terbuka; (4) Angka Melek Huruf; 5) Upah minimum Kabupaten/Kota. Dalam penelitian ini menggunakan data panel (*pooling data*). Data panel merupakan gabungan antara *time series* (tahun 2000 - tahun 2015, selama 5 (lima) tahun dengan *cross section* 37 (tiga puluh tujuh) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

### 3.2 Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linear Berganda dengan model data panel dan menggunakan Eviews 7 sebagai alat pengolahan data. Data panel merupakan kombinasi antara data deret waktu (*time series*) dengan data lintas sektor atau individual (*cross section*). Menurut Baltagi (1995) dalam Iqbal (2015), data panel lebih baik digunakan dalam model regresi

dibandingkan data *time series* ataupun data *cross section*, alasannya adalah (Daryanto dan Hafizrianda, 2010 dan Gujarati, 2003 dalam Iqbal, 2015);

1. Bila data panel berhubungan dengan individu, perusahaan, negara, daerah dan lain-lain ada waktu tertentu, maka data tersebut adalah heterogen. Teknik estimasi data panel yang heterogen secara eksplisit dapat dipertimbangkan dalam perhitungan.
2. Kombinasi data *time series* dan *cross section* akan memberikan informasi yang lebih lengkap, lebih beragam, kurang berkorelasi antar variabel, derajat bebas lebih dan lebih efisien.
3. Studi data panel lebih memuaskan untuk menentukan perubahan dinamis dibandingkan studi berulang-ulang dari *cross section*.
4. Data panel membantu studi untuk menganalisis perilaku yang lebih kompleks, misalnya fenomena skala ekonomi dan perubahan teknologi.
5. Data panel dapat meminimalkan bias yang dihasilkan oleh agregasi individu atau perusahaan karena unit data lebih banyak.

Manfaat yang paling banyak dirasakan oleh para ahli ekonomi dalam penggunaan data panel adalah mengatasi masalah kekurangan data yang tidak dapat dipenuhi oleh data *time series* (Daryanto dan Hafizrianda, 2010 dalam Iqbal, 2015). Menurut Gujarati (2010), data panel menggunakan metode GLS atau OLS yang sudah ditransformasikan dan memenuhi asumsi model klasik. Keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh metode data panel, maka tidak harus dilakukan pengujian asumsi klasik (Verbeek, 2000, Gujarati, 2003; Wibisono, 2005; Aulia, 2004 dalam Ajija, 2011). Namun dalam penelitian ini masih tetap menggunakan uji asumsi klasik karena ingin mengetahui apakah terdapat masalah asumsi klasik dalam penelitian ini. Amelia (2012 dalam Iqbal, 2015) dalam model data panel, persamaan dari data *time series*, dapat dituliskan sebagai berikut :

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + \mu_t ; t= 1,2,...,t \dots\dots\dots (3,1)$$

Sedangkan persamaan model data panel menggunakan data *cross section* berikut :

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \mu_i ; i= 1,2,...,n \dots\dots\dots (3,2)$$

Mengingat data panel merupakan gabungan dari data *time series* dan *cross section*, maka model dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \mu_{it} ; t= 1,2,\dots,n ; t = 1,2\dots,t \dots\dots\dots (3,3)$$

Dimana :

- t : banyaknya waktu
- n : banyaknya observasi
- nxt : banyaknya data panel

Dalam penelitian ini tingkat kemiskinan merupakan fungsi dari PDRB, tingkat pengangguran terbuka, angka melek huruf dan upah minimum maka persamaan fungsinya sebagai berikut :

$$TK_{it} = f (PDRB_{it}, TPT_{it}, AMH_{it}, UMK_{it})$$

Dari persamaan fungsi di atas kemudian ditransformasikan ke dalam model ekonometrika sebagai berikut :

$$TK_{it} = \beta_0 + \beta_1 PDRB_{it} + \beta_2 TPT_{it} + \beta_3 AMH_{it} + \beta_4 UMK_{it} + e_{it} \dots\dots\dots (3,5)$$

Dimana :

- TK = Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Timur
- PDRB = Laju Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Timur
- TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka
- AMH = Angka Melek Huruf
- UMK = Upah Minimum Kabupaten/Kota
- i = *cross section*
- t = *time series*
- $\beta_0$  = konstanta
- e = *Error term*

Adanya perbedaan satuan dan besaran antara variabel dependen dengan variabel independen, maka persamaan regresi ditransformasikan ke dalam model semi logaritma (semilog). Dinamakan sebagai model semilog karena hanya ada satu variabel yang berbentuk logaritma (Gujarati, 2003). Sehingga persamaannya sebagai berikut :

$$\text{Log } TK_{it} = \beta_0 + \beta_1 PDRB_{it} + \beta_2 TPT_{it} + \beta_3 AMH_{it} + \beta_4 UMK_{it} + e_{it} \dots\dots\dots (3,5)$$

Dalam analisis model data panel dapat digunakan dua metode yaitu *fixed effect* (FEM) dan *random effect method* (REM). Oleh karena itu sebelum model diestimasi dengan model yang tepat, maka dilakukan uji spesifikasi untuk

menganalisis apakah memilih FEM atau REM. Pilihan tersebut ditentukan dengan menggunakan *Hausman-test*.

### 3.2.1 Fixed Effect Model (FEM)

Model ini menggunakan variabel dummy untuk memungkinkan perubahan-perubahan dalam intersep kerat lintang dan deret waktu. Intersep hanya bervariasi terhadap individu namun konstan terhadap waktu sedangkan koefisien regresi atau slopenya bersifat konstan terhadap individu maupun waktu. Kelemahan model efek tetap adalah penggunaan jumlah *degree of freedom* (derajat kebebasan) yang banyak serta penggunaan *dummy* tidak secara langsung mengidentifikasi apa yang menyebabkan garis regresi bergeser lintas waktu dan lintas individu. Model FEM ini dapat ditulis sebagai berikut (Amelia, 2012 dalam Iqbal, 2015) :

$$Y_i = \alpha_i + \beta X_i + \varepsilon_i \dots\dots\dots (3,6)$$

### 3.2.2 Random Effect Model (REM)

Pendekatan *Random Effect* yaitu estimasi data panel dimana residual mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu (Suliswanto, 2010). Model ini meningkatkan efisiensi proses pendugaan kuadrat terkecil dengan memperhitungkan pengganggu-pengganggu kerat lintang dan deret waktu. Model estimasinya yang digunakan adalah

$$Y_{it} = \alpha_i + \beta X_{it} + \mu_i + \varepsilon_i \dots\dots\dots (3,6)$$

Dengan  $(\mu_i)$  adalah nilai gangguan acak pada observasi (i) dan konstan sepanjang waktu (Amelia, 2012 dalam Iqbal, 2015).

Menurut Gujarati (2003) beberapa keunggulan dari masing-masing kedua model tersebut dapat juga dilihat secara apriori model manakah yang lebih tepat.

Keunggulan yang dimaksud antara lain :

1. Jika jumlah *time series* (t) besar sedangkan jumlah *cross section* (n) kecil, maka hasil *fixed effect* dan *random effect* sedikit berbeda sehingga dapat memilih FEM karena lebih mudah untuk dihitung.
2. Jika t kecil dan n besar, maka hasil estimasinya sangat berbeda. Sehingga, jika unit analisis yang diambil bersifat acak (*random*) maka *random effect*

lebih tepat. Namun, jika unit analisis dalam penelitian tidak diambil secara acak maka *fixed effect* yang tepat digunakan.

3. Jika komponen error individual berkorelasi maka penaksir *random effect* akan bias dan penaksir *fixed effect* tidak bias.
4. Jika  $t$  kecil dan  $n$  besar, dan asumsi yang digunakan adalah *random effect*, maka estimasi *random effect* lebih efisien dibandingkan *fixed effect* (Daryanto dan Hafizrianda, 2010 dalam Iqbal, 2015).

### 3.3 Pemilihan Model dalam Pengolahan Data

#### 3.3.1 Hausman Test

Metode *fixed effect* dan *random effect* menghasilkan koefisien yang berbeda, karena asumsi yang digunakan kedua metode tersebut juga berbeda. Pada FEM, varians error dari observasi satu dengan observasi lainnya dianggap konstan. Sedangkan dengan REM, varians error diasumsikan tidak sama. Akibatnya bisa terjadi perbedaan keputusan dalam melihat signifikansi dari variabel-variabel independen yang disertakan dalam model. Salah satu metode ekonometrika yang sering digunakan untuk menganalisis apakah lebih baik FEM atau REM untuk memecahkan sistem persamaan panel data adalah dengan uji Hausman (Daryanto dan Hafizrianda, 2010 dalam Iqbal, 2015).

Dalam pengujiannya terdapat hipotesa sebagai berikut :

$H_0$  : *Random Effects* lebih baik daripada *Fixed Effects*

$H_1$  : *Fixed Effects* lebih baik daripada *Random Effects*

Sebagai dasar penolakan Hipotesa nol maka digunakan statistik hausman dan membandingkannya dengan *chi square*. Statistik hausman dirumuskan sebagai berikut (Maulia, 2014 dalam Iqbal, 2015).

$$M = (\beta - b)(M_0 - M_1)^{-1}(\beta - b) \dots \dots \dots (3,8)$$

Dimana :

$\beta$  = Vektor untuk statistik variabel *Fixed Effect*

$b$  = Vektor untuk statistik variabel *Random Effect*

$M_0$  = Matriks kovarians untuk dugaan *Random Effect*

$M_1$  = Matriks kovarians untuk dugaan *Fixed Effect*

Jika nilai M hasil pengujian lebih besar dari  $\chi^2$  tabel atau nilai *hausman test* lebih besar dari taraf nyata (*chi square* hitung > *chi square* tabel dan probabilitas hitung >  $\alpha = 5\%$ ) maka cukup bukti untuk melakukan penerimaan terhadap hipotesa nol sehingga model yang digunakan adalah *random effects*, dan begitu juga sebaliknya.

### 3.4 Uji Statistik

Gujarati (2003) menyatakan bahwa secara umum, uji signifikansi merupakan sebuah prosedur untuk menguji kebenaran atau kesalahan dari hasil hipotesis nol. Ide dasar dibalik pengujian signifikansi adalah uji statistik (estimator) dan distribusi sampling dari statistik yang dinyatakan hipotesis nol. Keputusan untuk menerima atau menolak  $H_0$  dibuat berdasarkan nilai uji statistik yang diperoleh dari data yang ada. Uji statistik terdiri dari pengujian koefisien regresi parsial (uji t), pengujian koefisien regresi secara bersama-sama (uji F) dan pengujian koefisien determinasi (uji  $R^2$ ).

#### 3.4.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji signifikansi parameter individual (uji t) dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual dan menganggap variabel lain konstan. Hipotesis yang digunakan :

$H_0$  :  $b_1; b_2; b_3; b_4 = 0$  artinya, secara parsial semua variabel independen tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

$H_1$  :  $b_1; b_2; b_3; b_4 \neq 0$  artinya, secara parsial semua variabel independen berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

Nilai t hitung dapat dicari dengan rumus :

$$t = \frac{\beta_i - \beta_i^*}{SE(\beta_i)}$$

dimana :

$\beta_i$  = parameter yang diestimasi

$\beta_i^*$  = nilai hipotesis dari  $\beta_i$  ( $H_0 : \beta_i - \beta_i^*$ )

$SE(\beta_i)$  = simpangan baku  $\beta_i$

Sedangkan nilai t tabel dapat dicari dengan rumus :

$$t_{\text{tabel}} = (\alpha; df), df = n - k$$

dimana :

$$\alpha = 0,05$$

n = jumlah observasi

k = jumlah variabel independen

Pada tingkat signifikansi 5 persen dengan pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Jika  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$  maka  $H_0$  ditolak, artinya salah satu variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
- b. Jika  $t\text{-hitung} \leq t\text{-tabel}$  maka  $H_0$  diterima, artinya salah satu variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

### 3.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependen. Hipotesis yang digunakan :

1.  $H_0 : b_1, b_2, b_3, b_4 = 0$  semua variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama.
2.  $H_1 : b_1, b_2, b_3, b_4 \neq 0$  semua variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama.

Nilai F hitung dirumuskan sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2/(k - 1)}{1 - R^2/(N - 1)}$$

Dimana :

k = jumlah parameter yang diestimasi termasuk konstanta

N = jumlah observasi

Pada tingkat signifikansi 5 persen dengan kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut (Gujarati, 2003):



1.  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima apabila Probabilitas  $F \leq \alpha 0,05$ , yang artinya variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.
2.  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak apabila Probabilitas  $F > \alpha 0,05$ , yang artinya variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen.

### 3.4.3 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

$R^2$  bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh variasi variabel independen dapat menjelaskan variabel dependennya. Nilai  $R^2$  yang sempurna dapat dijelaskan sepenuhnya oleh variabel independen yang dimasukkan dalam model.

Dimana  $0 < R^2 < 1$  sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah :

1. Nilai  $R^2$  yang lebih kecil atau mendekati nol, berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas.
2. Nilai  $R^2$  yang mendekati satu, berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

## 3.5 Uji Asumsi Klasik

### 3.5.1 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Salah satu munculnya multikolinearitas adalah  $R^2$  sangat tinggi dan tidak satupun koefisien regresi yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel tidak bebas secara skostatik (Wijayanto, 2010 dalam Iqbal, 2015).

Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas maka dengan cara menguji koefisien korelasi antar variabel independen. Jika koefisien korelasi cukup tinggi di atas 0,85 maka diduga terdapat multikolinearitas dalam model. Sebaliknya, jika koefisien korelasi rendah di bawah 0,85 maka model tersebut tidak terdapat masalah multikolinearitas (Widajono, 2013 dalam Iqbal, 2015).

### 3.5.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali dalam Iqbal, 2015).

Penelitian ini menggunakan uji Glejser, untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas. Uji Glejser dilakukan dengan meregresikan variabel-variabel bebas terhadap nilai absolut residualnya (Gujarati 2003). Sebagai pengertian dasar, residual adalah selisih antara nilai observasi dengan nilai prediksi dan absolut adalah nilai mutlaknya.

### 3.5.3 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk melihat apakah terjadi korelasi antara periode  $t$  dengan periode  $t-1$ . Statistik uji yang sering dipakai adalah Durbin Watson *statistics* (DW-*statistics*). Autokorelasi sering muncul pada kasus dimana data yang digunakan memasukkan unsur waktu (data *time-series*). Pada beberapa paket *software* statistika, output untuk uji asumsi autokorelasi pada error dengan Durbin Watson *statistics* tidak menyertakan p-value sebagai alat pengambilan keputusan, sehingga pengguna masih harus menggunakan tabel Durbin Watson *bounds* (Kurniawan, 2008 dalam Iqbal, 2015). Tabel 3.1 menunjukkan kriteria uji DW-*statistics* untuk melihat gejala autokorelasi :

Tabel 3.1 Kriteria Pengujian Durbin Watson

Hipotesis Nol	Keputusan	Kriteria
Ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	Tidak ada keputusan	$dl < d < du$
Ada autokorelasi negatif	Tolak	$4-dl < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tidak ada keputusan	$4-du < d < 4-dl$
Tidak ada autokorelasi	Terima	$du < d < 4-du$

Sumber : Imam Gozali dalam Iqbal 2015

Pengujian autokorelasi ini dilakukan dengan cara membandingkan hasil uji Durbin Watson dengan tabel Durbin Watson. Apabila nilai uji Durbin Watson terletak diantara 0 dan batas bawah tabel Durbin Watson maka dapat disimpulkan bahwa terdapat masalah autokorelasi. Sedangkan apabila terletak diantara batas bawah dan batas atas tabel Durbin Watson atau mendekati nilai 2 maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi. Aturan perbandingan ini ditunjukkan pada Gambar 3.1 berikut.



Gambar 3.1 Aturan membandingkan Uji Durbin Watson dengan Tabel Durbin Watson (Sumber : Imam Gozali dalam Iqbal, 2015)

Keterangan :  $d$  = nilai statistik uji Durbin-Watson

$dl$  = batas bawah tabel Durbin-Watson pada suatu  $n$  dan  $k$  tertentu

$du$  = batas atas tabel Durbin-Watson pada suatu  $n$  dan  $k$  tertentu

$n$  = banyaknya observasi

$k$  = banyaknya variabel independen

#### 3.5.4 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal. Ada beberapa metode untuk mengetahui normal atau tidaknya, antara lain J-B test dan metode grafik. Penelitian ini akan menggunakan metode J-B test yang dilakukan dengan menghitung skewness dan kurtosis, apabila J-B hitung  $\leq$  nilai  $X^2$  (chi square) tabel, maka nilai residual berdistribusi normal dan bila probabilitasnya  $> 5$  persen, maka data berdistribusi normal (Wijayanto, 2010 dalam Iqbal, 2015).

#### 3.6 Definisi Operasional Variabel

Variabel operasional merupakan variabel yang bertujuan untuk menjelaskan istilah yang digunakan dalam penelitian ini dan menghindari luasnya permasalahan. Adapun variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah :

a. Tingkat kemiskinan (TK)

Variabel ini merupakan gambaran dari tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Dalam penelitian ini nilai variabel yang digunakan adalah presentase penduduk miskin di setiap kabupaten/kota i pada tahun t di Provinsi Jawa Timur. Data kemiskinan ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur dengan satuan persen.

b. Laju pertumbuhan ekonomi

Variabel ini merupakan gambaran dari pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Dalam penelitian ini nilai variabel yang digunakan adalah laju PDRB di setiap kabupaten/kota i pada tahun t di Provinsi Jawa Timur. Data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur dalam satuan persen.

c. TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)

TPT menggambarkan kondisi pengangguran terbuka yaitu presentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, yang ada di Provinsi Jawa Timur. Dalam penelitian ini nilai variabel yang digunakan

adalah Tingkat Pengangguran Terbuka di setiap kabupaten/kota  $i$  pada tahun  $t$  di Provinsi Jawa Timur. Data TPT ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur dalam satuan persen.

d. Angka Melek Huruf (dewasa) (AMH)

Angka melek huruf (dewasa) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Data AMH ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik dengan satuan persen.

e. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)

Upah minimum kabupaten/kota adalah upah minimum yang berlaku di daerah kabupaten/kota, yang diterima oleh pekerja per bulan (BPS, 2016). UMK yang digunakan dalam penelitian ini adalah upah minimum yang berlaku di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2000-2015. Data diambil dari Badan Pusat Statistik yang diukur dalam satuan rupiah.

## BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab 5, akan diuraikan kesimpulan penelitian mengenai analisis determinan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2000-2015, baik dari hasil analisis deskriptif maupun dari hasil penelitian kuantitatif. Selain itu, peneliti juga akan memaparkan berbagai kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan melalui tingkat pengangguran terbuka, laju pdrb, angka melek huruf, angka harapan hidup dan upah minimum kabupaten/kota.

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan analisis data tentang Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2000-2015 maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Secara bersama-sama tingkat pengangguran terbuka (TPT), laju pdrb (PDRB), angka melek huruf (AMH), angka harapan hidup (AHH) dan upah minimum (UMK) berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur tahun 2000-2015.
- b. Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur tahun 2000-2015.
- c. Laju PDRB tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur tahun 2000-2015.
- d. Angka melek huruf berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur tahun 2000-2015.
- e. Upah minimum kabupaten/kota berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur tahun 2000-2015.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat saran yang direkomendasikan antara lain :

- a. Laju PDRB tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Hal tersebut dikarenakan tidak meratanya pendapatan penduduk. Dengan hasil tersebut pemerintah diharapkan melaksanakan pembangunan yang berorientasi terhadap pemerataan pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada masing-masing wilayah. Serta mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada pada masing-masing wilayah sehingga dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan dapat menurunkan tingkat kemiskinan.
- b. Tingkat pengangguran terbuka masih tinggi dan berpengaruh terhadap kemiskinan sehingga perlu adanya kebijakan penyediaan lapangan kerja yang sebanding dengan jumlah angkatan kerja sehingga mengurangi jumlah pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan.
- c. Angka melek huruf dari tahun ke tahun cenderung meningkat dan berpengaruh dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Oleh sebab itu, perlu dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi program-program yang dapat meningkatkan mutu pendidikan seperti bantuan beasiswa bagi masyarakat tidak mampu dan lain-lain.
- d. Upah minimum dari tahun ke tahun cenderung meningkat dan berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan. Maka perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi upah minimum yang sesuai dengan kebutuhan hidup minimum masyarakat pada masing-masing kabupaten/kota di Jawa Timur sehingga masyarakat semakin sejahtera dan menurunkan angka kemiskinan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2005. *Dasar-dasar Ekonomi Wilayah*. Makassar: Graha Ilmu.
- Ajija, Shochrul R dkk. 2011. *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Jakarta : Salemba Empat.
- Anggraeni, N.M. 2017. *Determinan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Wanita Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2014*. Skripsi. Jember. Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
- Arsyad, Lincolin. 1992. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN.
- Astrini, N.M.M., dan I.B.P. Purbadharmaja. 2013. Pengaruh PDRB, Pengangguran dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali. *e-jurnal ekonomi pembangunan universitas udayana*. 8 (2).
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Di Indonesia*. November. Jakarta: BPS Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. Berbagai tahun. *Jawa Timur Dalam Angka*. Jakarta : BPS Indonesia.
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2016. *Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha*. Surabaya: BPS Jatim.
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur. Berbagai tahun. *Upah Minimum Menurut Kabupaten/Kota Di Jawa Timur*. Surabaya : Disnakertrans Jatim.
- Djojohadikusumo, Sumitro. 1995. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta : LP3ES.
- Ekananda, M. 2015. *Analisis Ekonometrika Data Panel*. Edisi Kedua. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ernawati. 2011. *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Nasional di Indonesia Tahun 2005-2009*. Skripsi. Surakarta. Program Sarjana Fakultas Ekonomi Sebelas Maret.
- Faturrohmin, R. 2011. *Pengaruh PDRB, Harapan Hidup dan Melek Huruf Terhadap Tingkat Kemiskinan (studi kasus 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)*. Skripsi. Jakarta. Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah.



- Gujarati, D. 2003. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta : Salemba Empat.
- Gujarati, D. 2010. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta : Salemba Empat.
- Iqbal, V.C. 2015. *Analisis Pengaruh Performa Ekonomi Makro Terhadap Kemiskinan di Jawa Timur*. Skripsi. Jember. Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
- Jhingan, M.L. 2012. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Edisi Keenambelas. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Kristanto, Dwi P. 2014. *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Brebes Tahun 1997-2012*. Skripsi. Semarang. Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Kuncoro, Mudrajad. 2006. *Ekonomika Pembangunan : Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPPSTIM YKPN.
- Kumalasari, Meirna. 2011. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah, Pengeluaran Perkapita dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah*. Skripsi. Semarang. Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Mankiw, N. Gregory. 2006. *Makro Ekonomi*. Edisi Keenam. Jakarta : Erlangga.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 93 Tahun 2010. *Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2011*. 19 November 2010. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Timur. Surabaya.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2011. *Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2012*. 20 November 2011. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Timur. Surabaya.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2012. *Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2013*. 24 November 2012. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Timur. Surabaya.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2013. *Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2014*. 20 November 2013. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Timur. Surabaya.

- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014. *Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2015*. 20 November 2014. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Timur. Surabaya.
- Prastyo, A.A. 2010. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan (studi kasus 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2003-2007)*. Skripsi. Semarang. Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Puspita, D.W. 2015. Analisis Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. *Journal of Economics and Policy*. 8 (1). 100-107.
- Rusdarti dan L.K. Sebayang. 2013. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *Economia*. 9 (1).
- Saleh, Sasumbar. 2002. Faktor-faktor Penentu Tingkat Kemiskinan Regional di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kajian Ekonomi Negara Berkembang*. 7 (2). 87-102.
- Saputra, W. A. 2011. *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten / Kota Jawa Tengah*. Skripsi. Semarang. Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Sirojuzilam. 2008. *Disparitas Ekonomi dan Perencanaan Regional*. Medan. Pustaka Bangsa Press.
- Sukirno, Sadono. 2004. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Jakarta. LPFEUI dan Bina Grafika.
- Suliswanto, M.S.W. Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Angka Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 8 (2).
- Todaro, M. P. 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta. Erlangga.
- Yacoub, Y. 2012. Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Eksos*. 8 (3). 176:185.
- World Bank. 2017. *Population Ranking*. April. Jakarta: World Bank Open data.

## LAMPIRAN

## Lampiran 1 Data Penelitian

Data analisis : Tingkat Kemiskinan (TK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Laju PDRB (PDRB), Angka Melek Huruf (AMH), Log Angka Harapan Hidup (LAHH), Log Upah Minimum Kab/kota (LUMK).

No	Provinsi	Tahun	TK	TPT	PDRB	AMH	L(UMK)
1	Pacitan	2000	25.44	1.33	3.9	81.20	5.3
1	Pacitan	2001	31.16	1.44	1.74	81.60	5.34
1	Pacitan	2002	25.02	1.62	2.06	95.59	5.39
1	Pacitan	2003	24.98	4.95	2.74	94.77	5.46
1	Pacitan	2004	20.08	4.09	3.49	83.05	5.73
1	Pacitan	2005	24.25	5.53	3.66	83.92	5.53
1	Pacitan	2006	25.39	3.58	4.27	89.19	5.6
1	Pacitan	2007	24.25	2.72	5.16	91.54	5.65
1	Pacitan	2008	21.17	3.1	5.57	91.54	5.69
1	Pacitan	2009	19.01	1.32	6.07	91.56	5.77
1	Pacitan	2010	19.5	0.87	6.53	91.58	5.79
1	Pacitan	2011	18.13	1.54	6.29	91.59	5.84
1	Pacitan	2012	17.22	1.02	6.33	91.63	5.87
1	Pacitan	2013	17.29	0.99	5.87	91.67	5.94
1	Pacitan	2014	16.18	1.08	5.21	97.56	6
1	Pacitan	2015	16.68	0.97	5.1	99.18	6.06
2	Ponorogo	2000	35.63	4.46	7.79	76.07	5.31
2	Ponorogo	2001	31.57	3.84	1.54	76.43	5.35
2	Ponorogo	2002	20.82	4.93	3.56	91.1	5.4
2	Ponorogo	2003	17.76	7.17	3.98	87.16	5.45
2	Ponorogo	2004	24.73	6.67	4.33	78.72	5.93
2	Ponorogo	2005	17.6	7.68	4.42	79.49	5.52
2	Ponorogo	2006	18.45	6.74	4.69	80.46	5.6
2	Ponorogo	2007	17.6	4.76	6.52	84.93	5.65
2	Ponorogo	2008	16.62	3.73	5.63	84.93	5.69
2	Ponorogo	2009	14.63	3.45	5.01	85.71	5.77
2	Ponorogo	2010	13.22	3.83	5.78	85.73	5.8
2	Ponorogo	2011	12.29	6.79	5.7	87.31	5.84
2	Ponorogo	2012	11.72	3.14	5.98	88.99	5.87
2	Ponorogo	2013	11.76	3.25	5.14	89.37	5.96
2	Ponorogo	2014	11.53	3.66	5.21	97.98	6
2	Ponorogo	2015	11.91	3.68	5.24	97.26	6.06

3	Trenggalek	2000	36.98	4.13	4.35	87.47	5.3
3	Trenggalek	2001	24.93	3.58	3.33	87.73	5.34
3	Trenggalek	2002	29.55	3.6	3.25	97.12	5.38
3	Trenggalek	2003	24.12	6	3.36	95.44	5.43
3	Trenggalek	2004	17.61	6.37	3.87	89.07	5.82
3	Trenggalek	2005	23.17	7.92	4.23	90.19	5.52
3	Trenggalek	2006	24.74	6.05	4.79	92.26	5.64
3	Trenggalek	2007	23.17	4.91	5.45	92.26	5.8
3	Trenggalek	2008	20.64	3.73	5.61	92.26	5.7
3	Trenggalek	2009	18.27	3.91	5.64	92.69	5.77
3	Trenggalek	2010	16	2.15	6.11	92.83	5.8
3	Trenggalek	2011	14.9	3.27	5.94	92.84	5.85
3	Trenggalek	2012	14.15	2.98	6.21	92.88	5.88
3	Trenggalek	2013	14.21	4.04	6	93.07	5.95
3	Trenggalek	2014	13.1	4.2	5.28	95.67	6
3	Trenggalek	2015	13.39	2.46	5.03	95.72	6.06
4	Tulungagung	2000	19.21	4.59	6.99	85.90	5.31
4	Tulungagung	2001	18.95	4.71	2.48	86.80	5.39
4	Tulungagung	2002	18.12	5.2	4.7	97.46	5.46
4	Tulungagung	2003	16.7	8.62	4.73	96.78	5.52
4	Tulungagung	2004	24.09	8.67	5.03	88.53	5.98
4	Tulungagung	2005	17.56	7.23	5.13	89.23	5.58
4	Tulungagung	2006	19.44	6.65	5.48	89.71	5.66
4	Tulungagung	2007	17.56	4.32	5.75	93.46	5.69
4	Tulungagung	2008	12.41	3.99	5.86	93.46	5.72
4	Tulungagung	2009	10.6	4.54	6.01	93.49	5.77
4	Tulungagung	2010	10.64	3.5	6.48	93.54	5.8
4	Tulungagung	2011	9.9	3.56	6.37	93.57	5.85
4	Tulungagung	2012	9.37	3.1	6.47	94.57	5.91
4	Tulungagung	2013	9.4	2.71	6.13	94.92	6
4	Tulungagung	2014	8.75	2.42	5.46	100	6.04
4	Tulungagung	2015	8.57	3.95	4.99	97.02	6.1
5	Blitar	2000	22.06	5.01	6.69	83.27	5.3
5	Blitar	2001	19.53	4.69	2.99	84.13	5.36
5	Blitar	2002	18.57	7.68	3.9	96.13	5.42
5	Blitar	2003	17.19	7.47	4.65	95.21	5.46
5	Blitar	2004	16.44	6.53	4.5	85.83	6.04
5	Blitar	2005	16.11	6.03	5.18	86.2	5.53
5	Blitar	2006	17.91	5.63	5.38	91.04	5.61
5	Blitar	2007	16.11	4.54	5.78	91.04	5.65
5	Blitar	2008	14.53	4.26	6.04	91.04	5.7
5	Blitar	2009	13.19	3	5.18	91.89	5.75

5	Blitar	2010	12.13	2.24	6.08	92.00	5.81
5	Blitar	2011	11.29	3.91	5.43	92.02	5.87
5	Blitar	2012	10.7	2.82	5.62	92.05	5.91
5	Blitar	2013	10.74	3.64	5.06	92.12	5.97
5	Blitar	2014	10.22	3.08	5.02	95.84	6
5	Blitar	2015	9.97	2.79	5.05	97.07	6.1
6	Kediri	2000	25.09	5.87	4.92	86.23	5.32
6	Kediri	2001	18.13	4.84	3.04	86.87	5.43
6	Kediri	2002	19.88	4.67	3.45	95.42	5.55
6	Kediri	2003	19.62	9.28	3.88	95.38	5.61
6	Kediri	2004	16.13	7.31	4.19	88.62	6.16
6	Kediri	2005	17.64	9.12	4.28	89.3	5.69
6	Kediri	2006	19.28	8.13	4.29	90.69	5.76
6	Kediri	2007	17.64	8.89	4.65	92.47	5.8
6	Kediri	2008	18.85	7.79	4.49	92.47	5.85
6	Kediri	2009	17.05	5.1	4.95	92.75	5.91
6	Kediri	2010	15.52	3.75	6.04	92.80	5.92
6	Kediri	2011	14.44	8.33	6.03	92.83	5.97
6	Kediri	2012	13.66	4.08	6.11	92.87	5.99
6	Kediri	2013	13.71	4.65	5.82	92.97	6.03
6	Kediri	2014	12.77	4.91	5.32	95.15	6.05
6	Kediri	2015	12.91	5.02	4.88	98.68	6.11
7	Malang	2000	26.66	4.91	3.6	84.93	5.37
7	Malang	2001	19.35	4.43	3.58	85.67	5.47
7	Malang	2002	19.05	4.14	3.85	96.13	5.64
7	Malang	2003	18.24	8.91	4.05	93.46	5.69
7	Malang	2004	17.27	7.82	5.47	83.93	6.37
7	Malang	2005	16.17	7.08	4.97	84.42	5.75
7	Malang	2006	17.1	7.85	5.74	88.84	5.81
7	Malang	2007	16.17	6.44	6.09	89.17	5.87
7	Malang	2008	15.08	6.22	5.75	89.17	5.9
7	Malang	2009	13.57	6.35	5.25	89.54	5.97
7	Malang	2010	12.54	4.49	6.27	89.55	6
7	Malang	2011	11.67	5.51	6.65	89.58	6.03
7	Malang	2012	11	3.75	6.77	90.73	6.05
7	Malang	2013	11.04	5.17	5.3	91.22	6.12
7	Malang	2014	11.07	4.83	6.01	94.7	6.21
7	Malang	2015	11.53	4.95	5.27	94.77	6.29
8	Lumajang	2000	24.26	4.54	2.66	77.70	5.31
8	Lumajang	2001	21.8	4.24	3.99	78.20	5.34
8	Lumajang	2002	22.31	3.98	3.68	90.08	5.41
8	Lumajang	2003	19.77	6.94	4.33	84.49	5.47

8	Lumajang	2004	16.22	6.7	4.99	79.84	6
8	Lumajang	2005	18.95	6.81	4.89	80.5	5.53
8	Lumajang	2006	20.02	8	5.22	86.28	5.61
8	Lumajang	2007	18.95	4.91	5.5	86.28	5.69
8	Lumajang	2008	18.17	4.33	5.43	86.28	5.74
8	Lumajang	2009	15.83	2.24	5.46	86.3	5.81
8	Lumajang	2010	13.98	3.17	5.92	86.32	5.83
8	Lumajang	2011	13.01	3.16	6.2	86.55	5.86
8	Lumajang	2012	12.36	4.6	6	86.58	5.91
8	Lumajang	2013	12.4	2.01	5.58	86.63	6
8	Lumajang	2014	11.75	2.83	5.32	96.82	6.04
8	Lumajang	2015	11.52	2.6	4.62	93.99	6.1
9	Jember	2000	32.26	3.48	3.71	74.30	5.32
9	Jember	2001	22.44	3.88	3.41	76.10	5.43
9	Jember	2002	18.68	2.89	3.94	89.79	5.49
9	Jember	2003	19.76	6.85	4.01	81.18	5.58
9	Jember	2004	17.96	7.38	4.66	79.13	5.59
9	Jember	2005	18.55	7.41	5.31	80.55	5.62
9	Jember	2006	18.54	11.43	5.7	82.84	5.72
9	Jember	2007	18.55	5.57	5.98	82.84	5.75
9	Jember	2008	17.74	4.48	6.04	82.84	5.8
9	Jember	2009	15.43	4.42	5.55	83.07	5.88
9	Jember	2010	13.27	2.71	6.05	83.48	5.91
9	Jember	2011	12.44	3.34	5.49	83.60	5.94
9	Jember	2012	11.76	3.77	5.83	83.65	5.96
9	Jember	2013	11.81	3.94	6.06	83.79	6.03
9	Jember	2014	11.28	4.64	6.2	81.87	6.1
9	Jember	2015	11.22	4.77	5.33	92.56	6.16
10	Banyuwangi	2000	16.86	4.39	3.46	82.20	5.32
10	Banyuwangi	2001	17.24	3.41	3.39	82.50	5.36
10	Banyuwangi	2002	17.4	4.25	4.25	93.88	5.42
10	Banyuwangi	2003	17.85	6.84	3.96	91.79	5.5
10	Banyuwangi	2004	17.24	7.41	3.93	84.27	6.18
10	Banyuwangi	2005	15.58	7.66	4.79	84.7	5.57
10	Banyuwangi	2006	16.64	6.71	4.74	85.93	5.71
10	Banyuwangi	2007	15.58	5.8	5.64	86.45	5.75
10	Banyuwangi	2008	13.91	5.62	5.8	86.45	5.79
10	Banyuwangi	2009	12.16	4.05	6.05	86.48	5.87
10	Banyuwangi	2010	11.25	3.92	6.22	86.65	5.91
10	Banyuwangi	2011	10.47	6.06	6.95	87.35	5.93
10	Banyuwangi	2012	9.93	3.41	7.24	88.08	5.96
10	Banyuwangi	2013	9.97	4.65	6.71	88.44	6.03

10	Banyuwangi	2014	9.29	7.17	5.7	96.01	6.09
10	Banyuwangi	2015	9.17	2.55	6.01	92.43	6.15
11	Bondowoso	2000	25.89	3.44	2.35	64.30	5.31
11	Bondowoso	2001	39.65	3.02	4.07	64.80	5.39
11	Bondowoso	2002	25.81	2.42	3.12	80.03	5.39
11	Bondowoso	2003	25.43	5.51	3.8	75.64	5.47
11	Bondowoso	2004	15.9	4.52	5.02	73.66	5.85
11	Bondowoso	2005	24.31	4.49	5.22	74.3	5.54
11	Bondowoso	2006	26.23	3.08	5.58	74.3	5.68
11	Bondowoso	2007	24.31	3.65	5.51	74.3	5.69
11	Bondowoso	2008	22.23	2.93	5.31	74.3	5.74
11	Bondowoso	2009	20.18	2.88	5.01	75.30	5.79
11	Bondowoso	2010	17.89	1.59	5.64	76.72	5.82
11	Bondowoso	2011	16.66	3.01	6.07	78.24	5.86
11	Bondowoso	2012	15.75	3.6	6.09	80.72	5.9
11	Bondowoso	2013	15.81	2.04	5.81	81.22	5.97
11	Bondowoso	2014	14.76	3.72	5.05	91.56	6.04
11	Bondowoso	2015	14.96	1.75	4.95	90.05	6.1
12	Situbondo	2000	16.04	2.4	2.26	65.13	5.31
12	Situbondo	2001	27.05	2.29	4.53	65.87	5.38
12	Situbondo	2002	23.71	2.13	3.16	81.34	5.4
12	Situbondo	2003	20.57	5.47	4.03	75.85	5.49
12	Situbondo	2004	24.36	6.23	4.23	72.38	5.79
12	Situbondo	2005	18.51	6.1	5.09	72.6	5.56
12	Situbondo	2006	17.43	6.03	5.43	76.99	5.63
12	Situbondo	2007	18.51	5.43	5.64	78.15	5.69
12	Situbondo	2008	18.02	3.89	5.11	78.15	5.72
12	Situbondo	2009	15.99	2.28	5.15	78.19	5.78
12	Situbondo	2010	16.23	3.13	5.75	78.23	5.77
12	Situbondo	2011	15.11	4.77	5.38	78.26	5.86
12	Situbondo	2012	14.29	3.33	5.43	78.31	5.9
12	Situbondo	2013	14.34	3.01	6.19	78.62	6.02
12	Situbondo	2014	13.15	4.15	5.79	84.23	6.02
12	Situbondo	2015	13.63	3.57	4.86	85.24	6.09
13	Probolinggo	2000	24.57	2.89	1.49	70.00	5.37
13	Probolinggo	2001	27	2.77	2.23	71.70	5.45
13	Probolinggo	2002	25.01	3.49	4.26	87.51	5.59
13	Probolinggo	2003	25.29	5.67	4.07	78.79	5.64
13	Probolinggo	2004	18.54	6.78	4.51	74.36	6.01
13	Probolinggo	2005	26.08	5.66	4.73	75	5.67
13	Probolinggo	2006	28.06	5.5	5.69	77.71	5.72
13	Probolinggo	2007	26.08	3.48	5.97	77.71	5.75

13	Probolinggo	2008	30.13	3.46	5.78	77.71	5.78
13	Probolinggo	2009	27.69	2.6	5.72	77.86	5.83
13	Probolinggo	2010	25.22	2.02	6.19	78.91	5.87
13	Probolinggo	2011	23.48	2.8	5.88	80.44	5.91
13	Probolinggo	2012	22.14	1.92	6.44	80.48	5.94
13	Probolinggo	2013	22.22	3.3	5.15	80.95	6.07
13	Probolinggo	2014	20.44	1.47	4.9	88.4	6.13
13	Probolinggo	2015	20.82	2.51	4.76	92.26	6.19
14	Pasuruan	2000	18.61	3.54	3.27	84.47	5.37
14	Pasuruan	2001	20.86	3.43	4.12	85.93	5.49
14	Pasuruan	2002	22.48	3.37	3.98	94.08	5.65
14	Pasuruan	2003	20.51	8.97	4.32	88.11	5.71
14	Pasuruan	2004	26.17	7.9	4.98	84.41	6.15
14	Pasuruan	2005	20.16	7.48	5.23	85.1	5.76
14	Pasuruan	2006	21.67	8.89	5.94	88.13	5.81
14	Pasuruan	2007	20.16	7.72	6.17	88.13	5.86
14	Pasuruan	2008	18.04	6.72	5.89	88.13	5.9
14	Pasuruan	2009	15.58	5.03	5.31	88.92	5.98
14	Pasuruan	2010	13.18	3.49	6.14	89.99	6
14	Pasuruan	2011	12.26	4.3	6.69	90.03	6.04
14	Pasuruan	2012	11.53	6.38	7.5	91.17	6.09
14	Pasuruan	2013	11.58	4.34	6.95	91.71	6.23
14	Pasuruan	2014	10.86	4.43	6.74	92.87	6.34
14	Pasuruan	2015	10.72	6.41	5.38	92.11	6.43
15	Sidoarjo	2000	5.67	4.71	3.92	95.60	5.37
15	Sidoarjo	2001	6.47	5.24	4.41	95.80	5.51
15	Sidoarjo	2002	13.15	7.05	4.13	98.95	5.65
15	Sidoarjo	2003	13.01	10.46	4.39	97.51	5.71
15	Sidoarjo	2004	20.27	8.98	5.33	96.62	6.23
15	Sidoarjo	2005	14.02	12.35	5.71	97.29	5.76
15	Sidoarjo	2006	12.97	9.4	5.38	97.37	5.81
15	Sidoarjo	2007	14.02	12.67	4.99	97.37	5.87
15	Sidoarjo	2008	8.35	11.91	4.83	97.37	5.9
15	Sidoarjo	2009	6.91	10.19	4.91	97.39	5.98
15	Sidoarjo	2010	7.45	8.35	5.63	97.42	6
15	Sidoarjo	2011	6.97	8.65	7.04	97.75	6.04
15	Sidoarjo	2012	6.42	5.37	7.26	97.79	6.09
15	Sidoarjo	2013	6.44	4.12	6.89	97.91	6.23
15	Sidoarjo	2014	6.4	3.88	6.44	99.33	6.34
15	Sidoarjo	2015	6.44	6.3	5.24	100	6.43
16	Mojokerto	2000	15.35	4.93	2.25	88.13	5.37
16	Mojokerto	2001	15.97	4.52	2.67	88.77	5.5



16	Mojokerto	2002	20.18	5.03	3.78	96.92	5.65
16	Mojokerto	2003	17.18	9.3	4	96.84	5.71
16	Mojokerto	2004	12.77	8.81	5.05	91.14	5.99
16	Mojokerto	2005	16	7.55	5.37	91.94	5.76
16	Mojokerto	2006	16.9	7.99	5.47	91.94	5.81
16	Mojokerto	2007	16	6.68	5.93	94.07	5.86
16	Mojokerto	2008	14.61	7.04	5.88	94.07	5.9
16	Mojokerto	2009	13.24	5.54	5.21	94.09	5.98
16	Mojokerto	2010	12.23	4.84	6.78	94.11	6
16	Mojokerto	2011	11.38	6.79	6.61	94.12	6.04
16	Mojokerto	2012	10.67	3.35	7.26	94.16	6.09
16	Mojokerto	2013	10.71	3.16	6.56	94.47	6.23
16	Mojokerto	2014	10.56	3.81	6.45	99.45	6.31
16	Mojokerto	2015	10.57	4.05	5.65	99.35	6.43
17	Jombang	2000	20.52	6.18	2.48	88.47	5.31
17	Jombang	2001	24.73	6.15	3.27	85.93	5.38
17	Jombang	2002	25.15	7.6	3.97	96.45	5.48
17	Jombang	2003	24.57	12.14	4.91	95.45	5.59
17	Jombang	2004	16.09	10.72	5.1	87.55	6.07
17	Jombang	2005	24.07	12.3	5.34	88.16	5.64
17	Jombang	2006	23.34	9.53	5.73	89.43	5.72
17	Jombang	2007	24.07	6.97	6.07	92.47	5.8
17	Jombang	2008	16.46	5.78	5.79	92.47	5.83
17	Jombang	2009	14.46	6.19	5.28	92.49	5.87
17	Jombang	2010	13.84	5.27	6.12	92.51	5.89
17	Jombang	2011	12.88	6.58	5.96	92.86	5.93
17	Jombang	2012	12.18	6.72	6.15	93.87	5.99
17	Jombang	2013	12.23	5.59	5.93	94.45	6.07
17	Jombang	2014	10.8	4.39	5.42	98.23	6.17
17	Jombang	2015	10.79	6.11	5.36	97.18	6.23
18	Nganjuk	2000	15.07	4.56	2.4	84.87	5.31
18	Nganjuk	2001	26.35	4.85	3.11	84.63	5.37
18	Nganjuk	2002	27.55	6.22	3.81	95.37	5.44
18	Nganjuk	2003	23.53	9.94	4.51	94.82	5.52
18	Nganjuk	2004	24.13	7.92	5.16	85.84	6.01
18	Nganjuk	2005	23.35	8.5	5.69	86.46	5.55
18	Nganjuk	2006	25.83	7.72	8.04	89.18	5.6
18	Nganjuk	2007	23.35	6.62	6.13	90.43	5.65
18	Nganjuk	2008	19.77	6.06	5.99	90.43	5.7
18	Nganjuk	2009	17.22	3.98	6.03	90.45	5.79
18	Nganjuk	2010	14.91	3.64	6.28	90.47	5.81
18	Nganjuk	2011	13.88	6.31	5.75	91.07	5.85

18	Nganjuk	2012	13.17	4.09	5.85	91.11	5.89
18	Nganjuk	2013	13.22	4.73	5.4	91.16	5.98
18	Nganjuk	2014	13.14	3.93	5.1	95.32	6.05
18	Nganjuk	2015	12.69	2.1	5.18	98.73	6.1
19	Madiun	2000	24.41	8.21	1.43	80.17	5.32
19	Madiun	2001	23.2	8.38	3.05	80.63	5.37
19	Madiun	2002	26.1	7.79	3.52	94.53	5.4
19	Madiun	2003	24.46	11.19	3.14	92.74	5.44
19	Madiun	2004	23.38	10.2	3.44	82.31	5.81
19	Madiun	2005	21.32	12.92	4.62	83.16	5.53
19	Madiun	2006	22.66	11.5	4.6	85.52	5.6
19	Madiun	2007	21.32	10.11	5.29	87.09	5.65
19	Madiun	2008	18.5	8.44	5.27	87.09	5.69
19	Madiun	2009	16.97	6.04	5.08	88.30	5.79
19	Madiun	2010	15.45	5.55	5.92	89.53	5.81
19	Madiun	2011	14.37	4.96	6.02	89.54	5.85
19	Madiun	2012	13.65	3.99	6.12	89.61	5.88
19	Madiun	2013	13.7	4.63	5.67	90.04	5.98
19	Madiun	2014	12.04	3.38	5.34	97.08	6.01
19	Madiun	2015	12.54	6.99	5.26	96.33	6.08
20	Magetan	2000	23.52	4.29	3.42	83.20	5.32
20	Magetan	2001	23.03	4.19	2.18	84.90	5.36
20	Magetan	2002	17.16	5.38	3.01	96.08	5.41
20	Magetan	2003	17.39	4.92	3.52	95.14	5.46
20	Magetan	2004	23.71	6.63	4.16	89.81	5.79
20	Magetan	2005	17.12	3.49	4.81	89.8	5.58
20	Magetan	2006	18.27	6.2	5.12	89.8	5.77
20	Magetan	2007	17.12	5.4	5.21	89.8	5.77
20	Magetan	2008	15.67	4.37	5.17	89.8	5.77
20	Magetan	2009	13.97	3.82	5.36	90.28	5.8
20	Magetan	2010	12.94	2.41	5.79	90.54	5.81
20	Magetan	2011	12.01	3.95	5.64	90.56	5.84
20	Magetan	2012	11.45	3.64	5.79	91.08	5.87
20	Magetan	2013	11.5	2.96	5.85	91.42	5.93
20	Magetan	2014	11.8	4.28	5.1	100	6
20	Magetan	2015	11.35	6.05	5.17	99.13	6.06
21	Ngawi	2000	23.06	5.76	2.4	79.03	5.32
21	Ngawi	2001	20.32	4.8	4.98	78.67	5.36
21	Ngawi	2002	26.7	4.84	2.26	91.9	5.4
21	Ngawi	2003	25.17	11.62	3.03	87.61	5.46
21	Ngawi	2004	17.14	5.53	4.35	80.11	5.92
21	Ngawi	2005	23.43	9.6	4.53	80.91	5.53

21	Ngawi	2006	25.31	9.31	16.81	80.91	5.64
21	Ngawi	2007	23.43	6.41	5.16	85.09	5.66
21	Ngawi	2008	20.86	8.18	5.52	85.09	5.7
21	Ngawi	2009	19.01	4.49	5.65	85.11	5.8
21	Ngawi	2010	18.26	4.8	6.09	85.13	5.83
21	Ngawi	2011	16.74	5.1	6.11	85.54	5.86
21	Ngawi	2012	15.94	2.94	6.63	85.58	5.89
21	Ngawi	2013	15.99	4.97	5.5	85.99	5.95
21	Ngawi	2014	14.88	5.61	5.82	91.72	6.01
21	Ngawi	2015	15.61	3.99	5.08	95.01	6.07
22	Bojonegoro	2000	26.94	4.35	1.95	78.07	5.31
22	Bojonegoro	2001	28.45	3.94	2.38	77.53	5.37
22	Bojonegoro	2002	28.34	3.92	3.78	90.65	5.4
22	Bojonegoro	2003	28.12	7.03	3.52	85.92	5.45
22	Bojonegoro	2004	25.26	8.56	9.65	81.03	6.08
22	Bojonegoro	2005	27.12	7.33	15.66	81.4	5.55
22	Bojonegoro	2006	28.38	8.61	8.8	84.55	5.67
22	Bojonegoro	2007	27.12	5.67	10.56	84.55	5.74
22	Bojonegoro	2008	23.87	5.93	10.24	84.55	5.79
22	Bojonegoro	2009	21.27	4.52	10.1	84.58	5.86
22	Bojonegoro	2010	18.78	3.29	11.84	84.78	5.91
22	Bojonegoro	2011	17.47	5.7	10.39	84.81	5.93
22	Bojonegoro	2012	16.6	3.42	3.77	84.85	5.96
22	Bojonegoro	2013	16.66	5.81	2.37	85.13	6.01
22	Bojonegoro	2014	15.48	3.21	2.29	89.79	6.05
22	Bojonegoro	2015	15.71	5.01	17.42	94.96	6.11
23	Tuban	2000	23.15	3.67	2.51	74.83	5.32
23	Tuban	2001	23.88	3.16	5.65	75.87	5.38
23	Tuban	2002	30.39	3.46	4.14	90.17	5.58
23	Tuban	2003	29.1	8.39	4.24	85.26	5.5
23	Tuban	2004	27.7	6.67	4.57	78.66	6.03
23	Tuban	2005	28.28	8.73	5.54	79.4	5.6
23	Tuban	2006	30.52	6.78	5.81	84.95	5.72
23	Tuban	2007	28.28	6.24	6.49	84.95	5.78
23	Tuban	2008	25.84	5.74	6.72	84.95	5.81
23	Tuban	2009	23.01	4.22	5.99	85.56	5.9
23	Tuban	2010	20.19	2.86	6.22	85.78	5.93
23	Tuban	2011	18.78	3.69	6.84	85.82	5.97
23	Tuban	2012	17.77	4.13	6.29	85.86	5.98
23	Tuban	2013	17.84	4.3	5.85	86	6.05
23	Tuban	2014	16.64	3.63	5.47	90.6	6.13
23	Tuban	2015	17.08	3.03	4.89	87.24	6.19

24	Lamongan	2000	12.51	3.43	2.86	81.23	5.31
24	Lamongan	2001	21.74	2.77	3.9	82.17	5.37
24	Lamongan	2002	29.66	2.99	3.23	95.39	5.43
24	Lamongan	2003	27.81	7.16	3.68	92.29	5.51
24	Lamongan	2004	28.36	6.76	4.47	84.04	6.1
24	Lamongan	2005	23.13	7.03	5.08	84.71	5.62
24	Lamongan	2006	25.74	9.12	5.39	85.61	5.74
24	Lamongan	2007	23.13	6.31	5.76	86.60	5.77
24	Lamongan	2008	22.51	6.3	6.22	86.60	5.81
24	Lamongan	2009	20.47	4.92	6.31	86.97	5.88
24	Lamongan	2010	18.7	3.62	6.89	87.14	5.94
24	Lamongan	2011	17.41	6.14	6.67	88.71	5.95
24	Lamongan	2012	16.64	4.75	6.92	88.76	5.97
24	Lamongan	2013	16.7	4.93	6.93	89.09	6.03
24	Lamongan	2014	15.68	4.3	6.3	94.95	6.08
24	Lamongan	2015	15.38	4.1	5.77	98.6	6.14
25	Gresik	2000	10.62	3.45	5.92	91.1	5.37
25	Gresik	2001	14.54	3.84	4.03	90.9	5.51
25	Gresik	2002	23.67	5.17	4.62	97.57	5.65
25	Gresik	2003	23.2	9.25	4.41	95.9	5.71
25	Gresik	2004	25.74	10.72	5.86	91.82	6.02
25	Gresik	2005	22.95	6.14	7.12	92.6	5.76
25	Gresik	2006	25.19	7.88	6.81	94.04	5.81
25	Gresik	2007	22.95	8.14	6.7	94.04	5.87
25	Gresik	2008	21.43	7.5	6.34	94.04	5.9
25	Gresik	2009	19.14	7.01	9.3	94.36	5.98
25	Gresik	2010	16.42	7.7	6.89	94.46	6
25	Gresik	2011	15.33	5.93	6.48	94.55	6.04
25	Gresik	2012	14.29	6.78	6.92	96.17	6.09
25	Gresik	2013	14.35	4.55	6.05	96.38	6.24
25	Gresik	2014	13.41	5.06	7.04	97.73	6.34
25	Gresik	2015	13.63	5.67	6.58	99.67	6.43
26	Bangkalan	2000	24.52	3.84	1.89	66.53	5.31
26	Bangkalan	2001	19.02	4.15	2.33	70.07	5.43
26	Bangkalan	2002	34.68	5.97	3.26	86.23	5.51
26	Bangkalan	2003	32.35	9.38	4.06	76.2	5.59
26	Bangkalan	2004	23.07	11.54	4.56	73.62	5.94
26	Bangkalan	2005	32.81	13.16	4.75	74.8	5.65
26	Bangkalan	2006	33.53	12.68	4.8	82.76	5.74
26	Bangkalan	2007	32.81	7.9	5.02	82.76	5.76
26	Bangkalan	2008	32.7	7.26	4.92	82.76	5.79
26	Bangkalan	2009	30.45	5.01	4.96	82.82	5.85

26	Bangkalan	2010	28.12	5.79	5.44	82.84	5.87
26	Bangkalan	2011	26.22	6.37	3.31	82.87	5.92
26	Bangkalan	2012	24.61	5.13	-1.42	82.9	5.94
26	Bangkalan	2013	24.7	6.78	0.19	82.93	5.99
26	Bangkalan	2014	22.38	5.68	7.19	83.67	6.04
26	Bangkalan	2015	22.57	5	-2.66	86.61	6.1
27	Sampang	2000	41.17	3.14	1.48	55.33	5.3
27	Sampang	2001	45.39	3.1	3.12	55.77	5.39
27	Sampang	2002	41.78	2	2.4	66.21	5.43
27	Sampang	2003	39.41	4.48	3.12	55.21	5.47
27	Sampang	2004	32.88	5.29	3.92	61.26	5.92
27	Sampang	2005	39.68	4.82	3.93	61.8	5.57
27	Sampang	2006	41.03	4.23	4.1	64.12	5.65
27	Sampang	2007	39.68	1.98	4.21	64.12	5.67
27	Sampang	2008	34.53	3.46	4.58	64.12	5.78
27	Sampang	2009	31.94	1.7	4.64	64.81	5.81
27	Sampang	2010	32.47	1.77	5.34	66.03	5.83
27	Sampang	2011	30.21	2.13	2.5	67.55	5.86
27	Sampang	2012	27.87	1.71	5.77	69.12	5.9
27	Sampang	2013	27.97	4.68	6.53	69.47	6.04
27	Sampang	2014	25.8	2.22	0.08	79.98	6.04
27	Sampang	2015	25.69	2.51	2.08	80.91	6.09
28	Pamekasan	2000	33.82	3.21	2.26	73.07	5.3
28	Pamekasan	2001	19.89	3.52	1.35	73.43	5.39
28	Pamekasan	2002	34.87	4.83	2.74	84.32	5.47
28	Pamekasan	2003	33.93	6.63	3.79	79.15	5.6
28	Pamekasan	2004	39.75	4.33	4	79.26	5.87
28	Pamekasan	2005	32.46	8.35	4.48	79.5	5.65
28	Pamekasan	2006	34.14	5.96	4.52	79.45	5.69
28	Pamekasan	2007	32.46	4.41	4.76	79.45	5.74
28	Pamekasan	2008	26.32	3.42	5.53	79.57	5.79
28	Pamekasan	2009	24.32	2.18	5.19	80.20	5.87
28	Pamekasan	2010	22.47	3.53	5.75	80.84	5.95
28	Pamekasan	2011	20.94	2.61	6.22	81.81	5.96
28	Pamekasan	2012	19.53	2.29	6.25	84.21	5.98
28	Pamekasan	2013	19.61	2.17	6.1	84.48	6.02
28	Pamekasan	2014	17.74	2.14	5.62	86.26	6.03
28	Pamekasan	2015	17.41	4.26	5.32	84.09	6.08
29	Sumenep	2000	29.14	2.76	3.58	67.73	5.32
29	Sumenep	2001	21.09	2.07	-7.33	68.67	5.34
29	Sumenep	2002	31.08	1.62	3.59	83.66	5.46
29	Sumenep	2003	29.15	6.1	3.7	69.38	5.55

29	Sumenep	2004	32.39	2.67	2.71	73.34	6.01
29	Sumenep	2005	32.5	6.8	3.08	73.9	5.62
29	Sumenep	2006	34.86	6.53	4.49	78.62	5.69
29	Sumenep	2007	32.5	3.28	4.97	78.62	5.73
29	Sumenep	2008	29.46	3.92	4.3	78.62	5.77
29	Sumenep	2009	26.89	2.27	4.44	78.62	5.83
29	Sumenep	2010	24.61	1.89	5.64	78.63	5.86
29	Sumenep	2011	23.1	1.99	6.13	78.65	5.89
29	Sumenep	2012	21.87	1.14	9.96	78.71	5.91
29	Sumenep	2013	21.96	2.56	14.45	78.75	5.98
29	Sumenep	2014	20.49	1.01	6.23	88.55	6.03
29	Sumenep	2015	20.2	2.07	1.27	83.4	6.09
30	Kota Kediri	2000	7.89	8.5	0.63	93.7	5.32
30	Kota Kediri	2001	17.33	8.36	1.5	94.50	5.43
30	Kota Kediri	2002	15.97	13.24	-2.49	99	5.55
30	Kota Kediri	2003	14.45	19.58	3.85	98.13	5.61
30	Kota Kediri	2004	30.34	11.25	5.75	96.49	5.4
30	Kota Kediri	2005	13.62	12.9	0.25	96.8	5.69
30	Kota Kediri	2006	13.85	12.19	5.19	96.8	5.76
30	Kota Kediri	2007	13.62	12.18	4.51	96.8	5.8
30	Kota Kediri	2008	11.71	11.27	4.66	97.39	5.85
30	Kota Kediri	2009	10.41	8.32	5.06	97.40	5.93
30	Kota Kediri	2010	9.31	7.39	5.91	97.52	5.95
30	Kota Kediri	2011	8.63	9.69	4.29	97.55	5.98
30	Kota Kediri	2012	8.11	8.12	5.27	97.6	6.01
30	Kota Kediri	2013	8.14	7.92	3.52	97.86	6.05
30	Kota Kediri	2014	7.95	7.66	5.85	100	6.06
30	Kota Kediri	2015	8.51	8.46	5.36	100	6.12
31	Kota Blitar	2000	16.64	6.78	3.7	93.27	5.3
31	Kota Blitar	2001	15.64	7.19	4.77	94.23	5.36
31	Kota Blitar	2002	12.82	10.14	6.17	98.68	5.43
31	Kota Blitar	2003	12.39	15.64	5.47	98.01	5.47
31	Kota Blitar	2004	13.58	10.58	5.83	94.97	5.09
31	Kota Blitar	2005	11.67	14.86	5.71	95.37	5.54
31	Kota Blitar	2006	11.99	10.09	5.89	96.78	5.59
31	Kota Blitar	2007	11.67	8.24	6.19	96.78	5.65
31	Kota Blitar	2008	9.34	6.97	6.29	97.22	5.7
31	Kota Blitar	2009	7.56	8.47	6.21	97.22	5.75
31	Kota Blitar	2010	7.63	6.66	6.32	97.23	5.82
31	Kota Blitar	2011	7.12	5.24	6.43	97.27	5.86
31	Kota Blitar	2012	6.72	3.68	6.52	97.31	5.91
31	Kota Blitar	2013	6.75	6.17	6.5	97.48	5.96

31	Kota Blitar	2014	7.15	5.71	5.88	100	6
31	Kota Blitar	2015	7.29	3.8	5.68	96.85	6.09
32	Kota Malang	2000	9.09	8.09	2.13	94.57	5.37
32	Kota Malang	2001	9.44	8.43	2.64	94.73	5.47
32	Kota Malang	2002	9.37	10.74	3.28	98.45	5.64
32	Kota Malang	2003	8.5	15.7	4.36	97.8	5.69
32	Kota Malang	2004	11.75	11.73	5.86	95.46	5.88
32	Kota Malang	2005	7.2	14.38	5.65	95.9	5.75
32	Kota Malang	2006	7.42	14.31	6.14	96.87	5.81
32	Kota Malang	2007	7.2	11.27	6.2	97.18	5.87
32	Kota Malang	2008	7.22	11.14	5.93	97.18	5.9
32	Kota Malang	2009	5.58	10.44	6.21	97.19	5.97
32	Kota Malang	2010	5.9	8.68	6.25	97.20	6
32	Kota Malang	2011	5.5	9.74	6.04	97.23	6.03
32	Kota Malang	2012	5.19	7.96	6.26	98.34	6.05
32	Kota Malang	2013	5.21	7.73	6.2	98.38	6.12
32	Kota Malang	2014	4.8	7.22	5.8	100	6.2
32	Kota Malang	2015	4.6	7.28	5.61	96.53	6.27
33	Kota Probolinggo	2000	7.79	7.33	1.72	86.87	5.37
33	Kota Probolinggo	2001	15.14	7.38	1.73	87.53	5.46
33	Kota Probolinggo	2002	23.25	9.01	4.44	91.79	5.6
33	Kota Probolinggo	2003	18.71	10.57	4.03	88.9	5.64
33	Kota Probolinggo	2004	7.22	10.17	5.63	88.02	5.3
33	Kota Probolinggo	2005	17.98	13.55	5.67	88.7	5.68
33	Kota Probolinggo	2006	17.82	10.25	5.92	88.7	5.72
33	Kota Probolinggo	2007	17.98	10.42	6.39	92.01	5.75
33	Kota Probolinggo	2008	23.29	9.93	6.02	92.31	5.78
33	Kota Probolinggo	2009	21.06	8.53	5.35	92.32	5.83
33	Kota Probolinggo	2010	19.03	6.85	6.12	92.49	5.86
33	Kota Probolinggo	2011	17.74	5.46	5.95	92.51	5.9
33	Kota Probolinggo	2012	18.33	5.26	6.49	92.55	5.94
33	Kota Probolinggo	2013	10.92	4.48	6.47	92.66	6.04
33	Kota Probolinggo	2014	8.37	5.16	5.93	98.44	6.09

	Probolinggo						
33	Kota Probolinggo	2015	8.17	4.01	5.86	98.49	6.15
34	Kota Pasuruan	2000	11.74	5.08	4.74	89.1	5.37
34	Kota Pasuruan	2001	10.61	6.26	4.23	90.50	5.48
34	Kota Pasuruan	2002	16.76	7.32	3.91	96.21	5.57
34	Kota Pasuruan	2003	13.63	11.7	4.67	95.59	5.64
34	Kota Pasuruan	2004	18.07	11.3	5.74	95.42	5.25
34	Kota Pasuruan	2005	12.43	16	5.83	95.6	5.67
34	Kota Pasuruan	2006	13.71	13.52	5.65	95.6	5.76
34	Kota Pasuruan	2007	12.43	11.33	5.46	95.92	5.81
34	Kota Pasuruan	2008	11.2	10.72	5.47	95.92	5.85
34	Kota Pasuruan	2009	9.34	7.57	5.03	96.13	5.9
34	Kota Pasuruan	2010	9	7.23	5.66	96.40	5.93
34	Kota Pasuruan	2011	8.39	6.22	6.28	96.42	5.96
34	Kota Pasuruan	2012	7.87	4.54	6.31	97.07	5.98
34	Kota Pasuruan	2013	7.9	5.41	6.51	97.12	6.07
34	Kota Pasuruan	2014	7.34	6.09	5.7	97.03	6.13
34	Kota Pasuruan	2015	7.47	5.57	5.53	99.2	6.19
35	Kota Mojokerto	2000	13.3	6.83	3.67	94.37	5.37
35	Kota Mojokerto	2001	15.05	7.57	6.1	95.23	5.5
35	Kota Mojokerto	2002	12.38	9.4	5.21	99.2	5.61
35	Kota Mojokerto	2003	11.78	15.16	5.64	97.74	5.67
35	Kota Mojokerto	2004	12.5	13.45	5.82	94.91	5.06
35	Kota Mojokerto	2005	10.7	15.5	5.48	95.29	5.69
35	Kota Mojokerto	2006	10.72	10.24	5.51	96.77	5.75
35	Kota Mojokerto	2007	10.7	11.94	5.98	96.77	5.81



	Mojokerto						
35	Kota Mojokerto	2008	8.88	12.12	5.27	97.10	5.83
35	Kota Mojokerto	2009	7.19	9.3	5.14	97.11	5.88
35	Kota Mojokerto	2010	7.41	7.52	6.09	97.12	5.9
35	Kota Mojokerto	2011	6.89	10.59	5.97	97.13	5.92
35	Kota Mojokerto	2012	6.46	7.52	6.09	97.18	5.94
35	Kota Mojokerto	2013	6.48	5.73	6.2	97.58	6.01
35	Kota Mojokerto	2014	6.42	4.42	5.83	98.3	6.09
35	Kota Mojokerto	2015	6.16	4.88	5.74	100	6.15
36	Kota Madiun	2000	12.38	10.68	3.5	92.47	5.32
36	Kota Madiun	2001	10.73	11.2	4.65	93.23	5.37
36	Kota Madiun	2002	11.38	13.88	4.16	98.46	5.41
36	Kota Madiun	2003	10.16	18.38	4.44	98.14	5.48
36	Kota Madiun	2004	10.76	12.56	4.74	95.90	5.23
36	Kota Madiun	2005	9.11	16.84	5.1	96	5.54
36	Kota Madiun	2006	7.87	15.38	5.43	96	5.6
36	Kota Madiun	2007	9.11	15.45	6.15	97.71	5.66
36	Kota Madiun	2008	6.69	12.72	6.24	97.71	5.71
36	Kota Madiun	2009	5.93	11.27	6.06	97.75	5.8
36	Kota Madiun	2010	6.11	9.52	6.93	97.78	5.83
36	Kota Madiun	2011	5.66	10.62	6.79	97.79	5.87
36	Kota Madiun	2012	5.35	6.89	6.83	97.84	5.9
36	Kota Madiun	2013	5.37	6.57	7.68	98.15	5.97
36	Kota Madiun	2014	4.86	6.93	6.62	100	6.02
36	Kota Madiun	2015	4.89	5.1	6.15	95.79	6.09
37	Kota Surabaya	2000	7.31	6.1	3.42	94.5	5.37
37	Kota Surabaya	2001	11.3	6.18	4.22	95.2	5.51
37	Kota Surabaya	2002	8.4	7.11	3.99	98.05	5.65
37	Kota Surabaya	2003	9.44	13.05	4.29	98.19	5.71
37	Kota Surabaya	2004	9.09	9.4	6	96.06	6.41
37	Kota Surabaya	2005	7.35	12.07	6.33	96.48	5.76
37	Kota Surabaya	2006	8.08	9.68	6.35	96.48	5.81

37	Kota Surabaya	2007	7.35	11.59	6.31	97.94	5.87
37	Kota Surabaya	2008	8.23	11.84	6.23	97.94	5.9
37	Kota Surabaya	2009	6.72	8.63	5.53	98	5.97
37	Kota Surabaya	2010	7.07	6.84	7.09	98.05	6.01
37	Kota Surabaya	2011	6.58	7.81	7.13	98.06	6.04
37	Kota Surabaya	2012	6.23	5.27	7.35	98.35	6.09
37	Kota Surabaya	2013	6.25	5.32	7.58	98.4	6.24
37	Kota Surabaya	2014	5.79	5.82	6.96	96.41	6.34
37	Kota Surabaya	2015	5.82	7.01	5.97	100	6.43

Sumber : BPS Jawa Timur, Disnakertrans

**Lampiran 2 Hasil Uji Model Data**

## Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests  
Equation: Untitled  
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	19.713509	(36,551)	0.0000
Cross-section Chi-square	489.984636	36	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:  
Dependent Variable: TK  
Method: Panel Least Squares  
Date: 12/20/17 Time: 12:34  
Sample: 2000 2015  
Periods included: 16  
Cross-sections included: 37  
Total panel (balanced) observations: 592

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	105.2961	5.002153	21.05016	0.0000
TPT	-0.044844	0.075072	-0.597338	0.5505
PDRB	-0.091490	0.124846	-0.732820	0.4640
AMH	-0.578236	0.029181	-19.81582	0.0000
LOG_UMK	-6.184871	0.944112	-6.550994	0.0000
R-squared	0.558973	Mean dependent var		17.60225
Adjusted R-squared	0.555967	S.D. dependent var		7.620635
S.E. of regression	5.078068	Akaike info criterion		6.096149
Sum squared resid	15136.84	Schwarz criterion		6.133172
Log likelihood	-1799.460	Hannan-Quinn criter.		6.110570
F-statistic	185.9959	Durbin-Watson stat		0.715347
Prob(F-statistic)	0.000000			

Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled  
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	74.566500	4	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
TPT	0.522593	0.381935	0.000351	0.0000
PDRB	0.087937	0.052661	0.000166	0.0062
AMH	-0.128760	-0.285214	0.000388	0.0000
LOG_UMK	-9.542434	-8.459520	0.028200	0.0000

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: TK  
Method: Panel Least Squares  
Date: 12/20/17 Time: 12:36  
Sample: 2000 2015  
Periods included: 16  
Cross-sections included: 37  
Total panel (balanced) observations: 592

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	80.52709	4.100730	19.63726	0.0000
TPT	0.522593	0.067532	7.738489	0.0000
PDRB	0.087937	0.094577	0.929797	0.3529
AMH	-0.128760	0.040596	-3.171753	0.0016
LOG_UMK	-9.542434	0.753967	-12.65631	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.807243	Mean dependent var	17.60225
Adjusted R-squared	0.793250	S.D. dependent var	7.620635
S.E. of regression	3.465086	Akaike info criterion	5.390094
Sum squared resid	6615.760	Schwarz criterion	5.693681
Log likelihood	-1554.468	Hannan-Quinn criter.	5.508345
F-statistic	57.68807	Durbin-Watson stat	1.325560
Prob(F-statistic)	0.000000		

Hasil Analisis Regresi Data Panel dengan Pendekatan *Fixed Effect*

Dependent Variable: TK  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 12/20/17 Time: 12:14  
 Sample: 2000 2015  
 Periods included: 16  
 Cross-sections included: 37  
 Total panel (balanced) observations: 592

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	80.52709	4.100730	19.63726	0.0000
TPT	0.522593	0.067532	7.738489	0.0000
PDRB	0.087937	0.094577	0.929797	0.3529
AMH	-0.128760	0.040596	-3.171753	0.0016
LOG_UMK	-9.542434	0.753967	-12.65631	0.0000
Pacitan-C	5.389762			
Ponorogo-C	-0.089917			
Trenggalek	3.658421			
Tulungagung	-2.380466			
Blitar	-2.299313			
Kediri	0.179273			
Malang	-0.616901			
Lumajang	-0.622128			
Jember	-0.976936			
Banyuwangi	-3.463344			
Bondowoso	3.453140			
Situbondo	-0.723661			
Probolinggo	7.390422			
Pasuruan	1.114891			
Sidoarjo	-6.375036			
Mojokerto	-1.486586			
Jombang	0.383832			
Nganjuk	1.542577			
Madiun	-0.213029			
Magetan	-0.811523			
Ngawi	1.378220			
Bojonegoro	4.720830			
Tuban	6.295183			
Lamongan	3.833768			
Gresik	2.734369			
Bangkalan	8.619775			
Sampang	15.52743			
Pamekasan	9.311032			
Sumenep	9.325499			
Kota Kediri	-6.110015			
Kota Blitar	-8.472786			
Kota Malang	-10.68112			
Kota Probolinggo	-2.661224			
Kota Pasuruan	-6.813565			
Kota Mojokerto	-8.962257			
Kota Madiun	-12.50905			
Kota Surabaya	-8.589564			

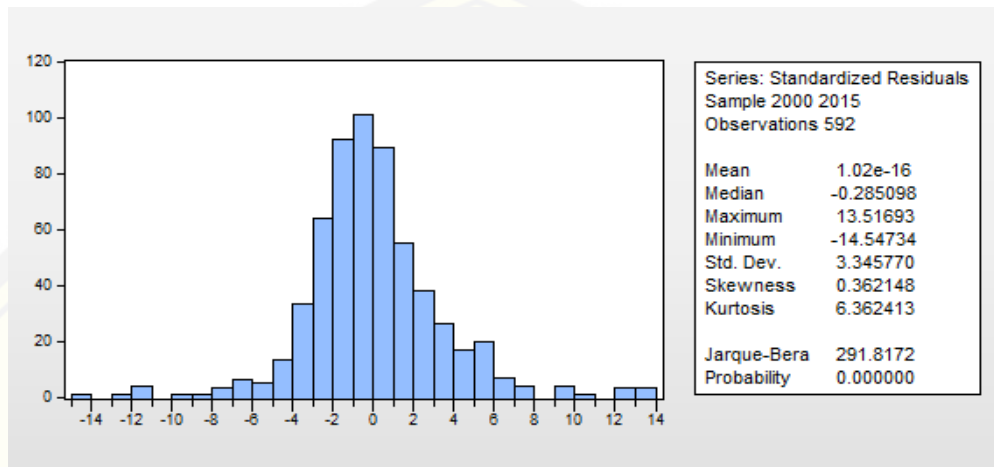
Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.807243	Mean dependent var	17.60225
Adjusted R-squared	0.793250	S.D. dependent var	7.620635
S.E. of regression	3.465086	Akaike info criterion	5.390094
Sum squared resid	6615.760	Schwarz criterion	5.693681
Log likelihood	-1554.468	Hannan-Quinn criter.	5.508345
F-statistic	57.68807	Durbin-Watson stat	1.325560
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 3 Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas



Hasil Uji Multikolinearitas

	TPT	PDRB	AMH	UMK
TPT	1.000000	0.021167	0.367280	-0.137691
PDRB	0.021167	1.000000	0.228475	0.420687
AMH	0.367280	0.228475	1.000000	0.317034
UMK	-0.137691	0.420687	0.317034	1.000000

Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: RESABS  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 12/20/17 Time: 12:45  
 Sample: 2000 2015  
 Periods included: 16  
 Cross-sections included: 37  
 Total panel (balanced) observations: 592

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	18.76069	2.575375	7.284643	0.0000
TPT	-0.064655	0.042412	-1.524464	0.1280
PDRB	-0.112018	0.059397	-1.885929	0.0598
AMH	-0.115796	0.025495	-4.541831	0.0000
LOG_UMK	-0.897854	0.473512	-1.896157	0.0585

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.221540	Mean dependent var	2.348006
Adjusted R-squared	0.165028	S.D. dependent var	2.381537
S.E. of regression	2.176173	Akaike info criterion	4.459754
Sum squared resid	2609.386	Schwarz criterion	4.763342
Log likelihood	-1279.087	Hannan-Quinn criter.	4.578006
F-statistic	3.920199	Durbin-Watson stat	2.002985
Prob(F-statistic)	0.000000		

Hasil Autokorelasi

R-squared	0.807243	Mean dependent var	17.60225
Adjusted R-squared	0.793250	S.D. dependent var	7.620635
S.E. of regression	3.465086	Akaike info criterion	5.390094
Sum squared resid	6615.760	Schwarz criterion	5.693681
Log likelihood	-1554.468	Hannan-Quinn criter.	5.508345
F-statistic	57.68807	Durbin-Watson stat	1.325560
Prob(F-statistic)	0.000000		

Uji Heteroskedastisitas dengan *cross section weighted*

Dependent Variable: TK  
 Method: Panel EGLS (Cross-section weights)  
 Date: 12/20/17 Time: 12:51  
 Sample: 2000 2015  
 Periods included: 16  
 Cross-sections included: 37  
 Total panel (balanced) observations: 592  
 Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	82.29265	3.153503	26.09563	0.0000
TPT	0.393350	0.050299	7.820285	0.0000
PDRB	-0.016203	0.077661	-0.208642	0.8348
AMH	-0.133995	0.030993	-4.323401	0.0000
LOG_UMK	-9.539429	0.560702	-17.01335	0.0000

## Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

## Weighted Statistics

R-squared	0.856335	Mean dependent var	20.80303
Adjusted R-squared	0.845905	S.D. dependent var	10.14858
S.E. of regression	3.437101	Sum squared resid	6509.329
F-statistic	82.10759	Durbin-Watson stat	1.383622
Prob(F-statistic)	0.000000		

## Unweighted Statistics

R-squared	0.805390	Mean dependent var	17.60225
Sum squared resid	6679.355	Durbin-Watson stat	1.285020